

### BAB III

#### ANALISIS FRAMING BERITA *HEADLINE* DAN PROSES *GATEKEEPING* SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

Dalam bab ini akan memaparkan data yang diperoleh peneliti dari sumber data penelitian yaitu *Headline* dengan tema politik pada Surat Kabar Harian Kompas edisi bulan Januari 2019 sebagai data utama dan hasil wawancara dengan Wakil Redaktur Pelaksana sebagai data pendukung. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis framing dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki yang menggunakan empat struktur yaitu struktur sintaksis, struktur skriptural, struktur tematik dan struktur retorik yang masing-masing dalam struktur tersebut mempunyai perangkat framing dan unit yang dapat dianalisa dan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

**Tabel Analisis Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki**

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
Sintaksis (cara wartawan dalam menyusun fakta)	1. Sistem berita	<i>Headline, lead, latar, kutipan pernyataan, penutup.</i>
Skrip (cara wartawan dalam mengisahkan fakta)	2. Kelengkapan berita	What, who, when, where, why, how

Tematik (cara wartawan dalam menuliskan berita)	3. Tema 4. Detail 5. Koherensi 6. Bentuk kalimat	Paragraf  Proporsisi  kalimat
Retoris (cara wartawan menekankan fakta)	7. Leksikon 8. Metafora 9. Grafis	Kata atau idiom  Grafik  Foto atau gambar

Kemudian dilanjutkan dengan proses *gatekeeping* Surat Kabar Harian Kompas yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Teori *gatekeeping* yang peneliti pilih dari Pamela J Shoemaker dengan lima level yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstramedia dan level sistem sosial.

### 3.1 Analisis berita 1

#### 3.1.1 Struktur Sintaksis

*Headline* : *Hoax* Merusak Kualitas Pemilu (4 Januari 2019)

Dalam edisi ini Surat Kabar Harian Kompas ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa berita bohong atau *hoax* merusak kualitas dari pemilihan presiden yang akan datang. Unsur *lead* pada teks berita menyatakan bahwa KPU melapor kepada polisi mengenai penyebaran informasi bohong di linimasa terkait adanya tujuh kontainer yang berisi jutaan surat suara yang telah dicoblos. Latar informasi yang dituliskan oleh Surat Kabar Harian Kompas menyebutkan bahwa elite politik dan tokoh publik diminta untuk tidak membuat gaduh suasana menjelang Pemilu 2019 dengan

menyebarkan informasi palsu atau *hoax* di ruang publik. Sebelumnya salah satu pernyataan yang membuat masyarakat menjadi heboh berasal dari Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief yang menggunggah cuitannya di media sosial *twitter* @andiarief\_ “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak ada fitnah harap dicari kebenarannya. Karena kabar ini sudah beredar”. Secara langsung dalam hal ini Surat Kabar Harian Kompas menggiring opini publik jika yang mengakibatkan gaduhnya suasana menjelang Pemilu 2019 adalah tokoh elite politik Andi Arief.

Narasumber yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas terdiri dari 5 orang yaitu, Presiden Joko Widodo, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Mahfud MD, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Ketua KPU, Arif Budiman, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC), Deni Surjantoro. Dari kelima narasumber diatas yang menyebutkan bahwa tidak adanya kontainer surat suara yang sudah dicoblos yaitu pernyataan dari ketua KPU Arif Budiman, “Kejadian itu tidak ada”. Kemudian diperjelas kembali dengan pernyataan dari Deni Surjantoro bahwa “Berita tujuh kontainer asal China berisi surat suara tidak benar. Sebelum barang masuk ke wilayah RI, DJBC terlebih dahulu mendapatkan manifest barang. Selanjutnya petugas akan melakukan analisis terhadap manifest itu termasuk melakukan operasi intelijen”. Pernyataan yang lain diungkapkan oleh Azyumardi Azra,

“Kalau ada informasi soal surat suara yang dicoblos, sebanyak tujuh kontainer, seharusnya dia melaporkan secara pribadi atau melapor

ke polisi atau KPU guna memastikan hal itu. Tidak perlu di buka di media sosial. Ini tindakan yang kurang bijak”.

Mahfud MD memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda,

“Kalau orang tidak jeli, mungkin mereka akan langsung percaya pada berita tertentu. Dalam kondisi itu, bisa jadi ada yang menumpang kesempatan membikin kisruh, memfitnah orang atau mengambil keuntungan politik”.

Dalam kutipan yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas ini menekankan mengenai kesalahan Andi Arief sebagai elite politik yang salah dalam mengambil keputusan untuk menulis cuitan di media sosial dan membahas hal politik menjelang Pemilu 2019.

Meskipun terdapat pernyataan yang mengungkapkan bahwa tidak adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos, pada akhir paragraf dalam Surat Kabar Harian Kompas mengungkapkan bahwa isu mengenai *hoax* yang sedang ramai diperbincangkan tersebut masih dalam proses investigasi dan akan terus dilakukan penuntasan kasus tersebut karena sudah dilaporkan oleh beberapa pimpinan KPU yang didampingi oleh anggota bawaslu.

### **3.1.2 Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip, Surat Kabar Harian Kompas mengisahkan fakta dari beberapa unsur, yang pertama unsur *What* menjelaskan *hoax* surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer telah menjadi konsumsi publik yang kemudian membuat resah karena pernyataan tersebut diungkapkan oleh elite politik yaitu Andi Arief sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang masuk ke dalam unsur *Who*.

Unsur ketiga adalah *When*, dalam informasi yang telah meresahkan masyarakat mengenai surat suara yang sudah dicoblos tersebut berita ini dimuat pada 4 Januari 2019. Informasi pertama kali yang membuat resah masyarakat diketahui dalam status media sosial twitter yang diunggah oleh Andi Arief yang masuk kedalam unsur *Where*. Karena adanya berita yang belum tentu kebenarannya tersebut maka beberapa pemimpin KPU melaporkan ke polisi untuk segera di usut tuntas yang masuk ke dalam unsur *Why*. Selanjutnya unsur *How* dalam Surat Kabar Harian Kompas dituliskan bahwa Kepala Bareskrim Komisaris Jendral Arief Sulistyanto sedang menginvestigasi dan segera menyelesaikan kasus ini.

### **3.1.3 Struktur Tematik**

Pada struktur tematik penulis berusaha menuliskan berita mengenai *hoax* yang telah tersebar luas di masyarakat dan surat suara yang telah dicoblos dilakukan oleh elite politik, cenderung merujuk pada Andi Arief yang terletak pada paragraf 11. Dalam artikel ini, Kompas memberikan kesan bahwa seharusnya semua pihak dapat tenang dan tidak membuat gaduh karena menjelang pemilu 2019, dengan tidak memberikan *statement* atau pernyataan yang kontroversial menyinggung permasalahan politik karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu mendatang.

Dalam paragraf 12 Andi Arief memberikan tanggapan terkait dirinya yang menjadi sorotan, bahwa seolah-olah hanya dirinya yang menyebarkan isu mengenai surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer,

“Saya tidak menuduh siapapun. Karena isu itu sudah menyebar dari sore, saya minta dicek supaya tidak ada fitnah. Kalau saya mengingatkan aparat supaya cepat bertindak malah dipolisikan, lucu benar negeri ini”.

Secara terpisah Azyumardi Azra memberikan komentarnya terkait isu hoax yang telah tersebar pada paragraf 10 bahwa

“Kalau ada informasi soal surat suara yang dicoblos, sebanyak tujuh kontainer, seharusnya dia melaporkan secara pribadi atau melapor ke polisi atau KPU guna memastikan hal itu. Tidak perlu di buka di media sosial. Ini tindakan yang kurang bijak”.

Kalimat tersebut dalam artikel Surat Kabar Harian Kompas menggambarkan seseorang menjadi subjek dalam pernyataan tersebut.

Pada paragraf 1 artikel ini, langsung merujuk pada koherensi sebab-akibat dan bentuk kalimat yang digunakan yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf. Dalam penulisan fakta berikutnya yang menggunakan wacana elemen maksud. Elemen maksud ini menjelaskan penulisan fakta secara eksplisit dan jelas yang terletak pada paragraf 17 dan memberikan penjelasan kepada khalayak bahwa isu yang sedang ramai diperbincangkan terkait surat suara sebanyak 7 kontainer yang sudah dicoblos masih dalam proses investigasi oleh bareskrim.

#### **3.1.4 Struktur Retoris**

Dilihat dari struktur retoris, penekanan fakta pada Surat Kabar Harian Kompas yaitu menggambarkan elite politik siapa yang telah membuat situasi menjelang pemilu 2019 menjadi gaduh. Terlihat jelas pada kalimat berikut, “Pantauan tim media sosial Kompas, 2 Januari hingga 3 Januari 2019 pukul 17.00, *hoax* tujuh

kontainer surat suara ini viral di linimasa twitter. Salah satu cuitan datang dari Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun twitternya @AndiArief\_ dengan cuitan “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok”. Dari narasumber yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas juga secara langsung memberikan kutipan komentar yang merujuk pada Andi Arief sebagai elite politik yang tidak seharusnya melakukan penyebaran informasi yang belum diketahui kebenarannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud MD dan Azyumardi Azra. Kata yang dipilih pada teks berita sebagai penekanan fakta seperti ‘hoax’, ‘surat suara’, ‘7 kontainer’.

Elemen berikutnya yaitu grafik yang berdampingan dengan artikel ini, Surat Kabar Harian Kompas membuat secara urut pencetakan dan distribusi surat suara pemilu 2019. Dimulai dari tanggal 5 Desember 2018 – 7 Januari 2019 mengenai tender katalog surat suara, kemudian 4 Januari 2019 persetujuan desain surat suara pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2019 dilanjutkan pada tanggal 8 - 10 Januari 2019 penandatanganan kontrak. 15 - 25 Maret 2019 mengenai proses pencetakan dan distribusi ke KPU kabupaten/kota. Terakhir tanggal 14-16 April 2019 mengenai Pengiriman Logistik pemilu ke TPS. Grafik ini ditampilkan kepada khalayak untuk menguatkan apa yang ingin disampaikan oleh Surat Kabar Harian Kompas, bahwa tidak ada kebocoran surat suara karena telah melalui proses sesuai dengan prosedur yang ada, dan hal ini sebagai bukti bahwa isu yang telah tersebar hanyalah *hoax* yang merugikan banyak pihak.

Pada berita 1 dapat diketahui bahwa framing yang ada merupakan konsep framing sosiologis yaitu melihat cara bagaimana konstruksi sosial atas realitas yang

ada. Realitas dalam hal ini adalah bagaimana pemberitaan mengenai Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief terhadap cuitan di media sosial twitter mengenai surat suara yang telah tercoblos sebanyak 7 kontainer yang ada pada Surat Kabar Harian Kompas.

*Making News : A study in the constructions of reality* yang disampaikan Tuchman mengatakan bahwa, berita merupakan jendela dunia yang dapat diketahui dari frame yang dilakukan. Berita yang ditampilkan untuk khalayak mempunyai tujuan untuk memberitahu apa yang ingin diketahui, apa yang perlu diketahui dan sebagai berita yang harus diketahui. Namun jendela yang menggambarkan dunia inipun mempunyai kemungkinan yang salah atau bermasalah. Hal tersebut karena pandangan yang dilihat tergantung dari jendela yang besar atau kecil, mempunyai panel yang banyak atau sedikit dilihat dari kaca buram atau jelas (dalam Kharisma, 2017: 172).

Framing yang sudah dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bagaimana frame yang telah dilakukan oleh Surat Kabar Harian Kompas. Seperti yang telah diungkapkan oleh Tuchman bahwa berita sebagai jendela dunia, *headline* yang ditampilkan adalah berita yang harus diketahui oleh khalayak. Namun pada akhirnya tulisan-tulisan yang ditampilkan menunjukkan hal-hal yang bermasalah. Dalam *headline* 4 Januari 2019, sangat terlihat Surat Kabar Harian Kompas menuliskan beritanya yang memojokkan Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief.

Hal ini juga melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk dan pada pasal 3 yang berisi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pada tulisan yang ada menunjukkan masih adanya opini yang masuk pada berita *headline*, seharusnya berita yang ingin ditampilkan kepada khalayak mencerminkan kode etik jurnalistik.

## **3.2 Analisis Berita 2**

### **3.2.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Jaga Legitimasi Pemilu 2019 (5 Januari 2019)

Surat Kabar Harian Kompas masih memilih tema yang sama dengan artikel sebelumnya, pada berita ini *lead* yang ditampilkan kepada khalayak yaitu munculnya sejumlah polemik dan informasi tidak benar terkait pemilu berpotensi mengancam legitimasi pemilu. Penulis ingin menegaskan bahwa bahaya *hoax* mengancam masa depan demokrasi negara Indonesia dengan kutipannya

“Semua pihak juga harus menahan diri, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Polisi juga harus mengusut tuntas beredarnya hoaks. Ini karena hoaks tidak hanya meresahkan, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi pemilu dan akhirnya juga demokrasi”.

Kesan yang muncul dalam artikel ini masih mengenai Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief yang membuat heboh masyarakat karena

cuitannya di media sosial twitter. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Henri Subiakto,

“Penyebaran hoaks di media sosial telah menjadi bagian dari permainan politik, kecenderungan hoaks ini dipakai untuk menyerang sejumlah lembaga tertentu selain calon kandidat yang bersaing”.

Penyusunan fakta selanjutnya dalam artikel ini, narasumber yang dipilih berjumlah delapan orang terdiri dari politisi dan praktisi yaitu Anggota KPU, Wahyu Setiawan, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, Pemerhati Media Sosial, Nukman Luthfie, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’aruf, Ahmad Basarah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Anggota KPU, Viryan Aziz dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral (Pol) Dedi Prasetyo.

Lebih lanjut, dalam berita edisi 5 Januari 2019 penulis ingin menambahkan variasi dalam pemberitaan. Polemik yang muncul bukan hanya surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer saja melainkan mengenai seputar daftar pemilih dan kotak suara dari karton kedap air. Mengenai daftar pemilih, kutipan yang ditampilkan yaitu dari Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade yang menyatakan :

“Kami selalu mengklarifikasi data pemilu kepada penyelenggara ketika mempunyai data yang berbeda, saat itu ada 31 juta pemilih ganda dan kami bertemu dengan KPU, hasilnya 25 juta data pemilih ganda dihapus sisanya 6 juta pemilih yang benar”.

Kemudian Surat Kabar Harian Kompas memberikan informasi mengenai data pemilih yang diambil pada bulan Desember 2018, Kementerian Dalam Negeri

pernah menyatakan ada sekitar 31 juta penduduk yang masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilu namun diduga belum semuanya sinkron dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) dan setelah dianalisis sekitar 6 juta pemilih dimasukkan ke DPTHP II. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Kompas bukan hanya memberikan berita namun benar-benar memberikan bukti kepada khalayak hal yang harus diketahui.

Untuk paragraf akhir dari artikel ini menunjukkan bahwa sudah ada 2 orang yang ditangkap terkait hoaks yang tersebar di media sosial dan sejumlah grup whatsapp namun bukan mengakhiri begitu saja, Surat Kabar Harian Kompas pada paragraf 18 sampai 20 membahas kembali mengenai Andi Arief yang telah memberikan pernyataan di akun media sosial twitter bahwa ada penggerebakan rumahnya di Lampung karena masalah cuitan hoax surat suara yang sudah di coblos sebanyak 7 kontainer. Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral (Pol) Dedi Prasetyo, polisi tidak punya kepentingan untuk menggerebek rumah Andi Arief karena masih fokus dengan proses investigasi kasus hoaks. Hal ini membuktikan bahwa apa yang ditulis pada artikel sebelumnya dalam Surat Kabar Harian Kompas jika Andi Arief merupakan orang yang membuat heboh karena pernyataannya di media sosial ternyata tidak benar karena sudah ada tersangka yang ditangkap yang dimuat dalam artikel 5 Januari 2019.

### 3.2.2 Struktur Skrip

Surat Kabar Harian Kompas dalam mengisahkan fakta dengan unsur *What* pada artikel ini mengenai legitimasi pemilu 2019 yang akan datang harus dijaga bersama karena akan menentukan kualitas masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia, hal ini dirasa mendesak karena berbagai polemik dan informasi yang tidak benar menjelang pemilu semakin banyak bermunculan. Selanjutnya dalam unsur *Who* memberikan informasi bahwa pihak kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku penyebaran informasi bohong atau *hoax*. Hal ini membuktikan bahwa *hoax* yang meresahkan masyarakat sudah ditangani serius oleh pihak kepolisian.

Unsur *When* dalam artikel ini tidak dijelaskan oleh penulis kapan penangkapan 2 orang tersangka penyebaran *hoax*, hanya memberikan informasi bahwa sudah ditangkap di dua kota yang berbeda. Unsur *Where* diketahui bahwa penyebar *hoax* ditangkap masing-masing di Kota Bogor, Jawa Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Unsur *Why* dijelaskan dalam artikel ini bahwa penangkapan dilakukan karena 2 orang tersangka tersebut tidak melakukan verifikasi atas informasi yang telah didapatkan namun langsung menyebarkan konten tersebut dan lebih lanjut pihak kepolisian mengusut pihak lain yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten *hoax*. Terakhir adalah unsur *How* pada paragraf penutup dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral (Pol) Dedi Prasetyo pihaknya fokus dalam mengungkapkan siapa pemilik suara dari rekaman yang menjadi dasar *hoax* surat suara tercoblos tersebut.

### 3.2.3 Struktur Tematik

Artikel ini berupaya memberikan gambaran mengenai pemilu yang sedang dalam keadaan terancam karena beberapa kasus yang muncul di media elektronik dan media sosial. Karena permasalahan ini bisa jadi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Koherensi yang digunakan dalam artikel ini yaitu sebab-akibat dan dijelaskan pada paragraf 2 sampai 6. Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf.

Unsur tematik dalam artikel ini mengangkat 2 tema yaitu, mengenai legitimasi pemilu perlu dijaga oleh semua pihak karena menyangkut kualitas pemilu nantinya serta masa depan konsolidasi demokrasi Indonesia dan penangkapan tersangka penyebar informasi bohong atau *hoax* yang terdapat pada paragraf 1 dan 15. Dalam teks berita, kata yang sering diulang yaitu “polemik”, “pemilu”, “legitimasi”, dan “berita bohong atau hoaks” yang terletak pada paragraf 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 dan 20. Elemen detail digunakan oleh Surat Kabar Harian Kompas dengan memberikan data atas pernyataan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade yang terletak pada paragraf 12.

Pada paragraf 15 sampai 17 pada artikel ini, dijelaskan oleh Badan Reserse Kriminal Polri sudah menangkap tersangka penyebar berita bohong, namun pada paragraf 18 sampai paragraf 20 penulis justru menambahkan informasi mengenai penggrebakan rumah Andi Arief yang berada di Bandar Lampung, yang sebelumnya Andi Arief memberikan pernyataan di akun twitternya, bahwa telah

ada penggerudukan dan meminta penjelasan Kepala Polri Jendral Tito Karnavian mengenai hal tersebut. Tidak adanya keselarasan atau koherensi terlihat jelas pada akhir paragraf yang ditulis oleh Surat Kabar Harian Kompas.

#### **3.2.4 Struktur Retoris**

Struktur retorik yang ditampilkan Surat Kabar Harian Kompas yaitu berupa pemilihan kata dan gambar/grafik. Pemilihan kata pada teks berita yaitu ‘polemik’, ‘hoaks’, ‘fenomena’, dan ‘follow up’. Unsur kedua yaitu gambar yang terletak pada halaman depan atau *headline* dengan judul “Kasus Hoaks Terkait Pemilu”. Pada urutan pertama dengan karikatur Ratna Sarumpaet dengan keterangan 2 Oktober 2018 penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. RS ditetapkan sebagai tersangka penyebar hoaks (4 Oktober 2018). Pada tanggal 20 November 2018 tersebar isu bahwa jika menang, Presiden Joko Widodo akan mengganti KH Ma’ruf Amin dengan Ahok yang diberi gambar karikatur Ma’ruf Amin, kemudian dibantah oleh Ma’ruf Amin dan mengatakan bahwa penggantian itu harus sesuai dengan prosedur. Terakhir ada gambar karikatur kontainer diikuti keterangan tanggal 2 Januari 2019 tujuh kontainer dari China di Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berisi jutaan surat suara yang sudah tercoblos. Tanggal 4 Januari 2019, Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan dua tersangka yakni HY di Bogor dan LS di Balikpapan sebagai penyebar konten Hoaks.

Artikel edisi 5 Januari ini masih berkaitan dengan berita mengenai Andi Arief karena pada akhir paragraf masih dituliskan berita mengenai Andi Arief, jika pada edisi 4 Januari penulis ingin menggambarkan bahwa penyebab kegaduhan menjelang pemilu karena informasi yang belum jelas kebenarannya dan disebar

melalui media sosial twitter oleh Andi Arief. Artikel ini menegaskan bahwa sudah ada tersangka yang ditangkap oleh Bareskrim, sehingga opini yang dituliskan pada edisi sebelumnya dipatahkan sendiri oleh Surat Kabar Harian Kompas. Hal ini dibuktikan Andi Arief tidak ditangkap oleh pihak kepolisian.

Pada analisis framing berita 2 diketahui konsep analisis yang ada masuk pada konsep sosiologis. Frame dalam hal ini melihat cara konstruksi sosial atas realitas pada berita edisi 5 Januari 2019 yang masih membahas mengenai Andi Arief. Namun pada edisi kali ini sudah ditemukan tersangka yang membuat suasana menjadi gaduh.

William A. Gamson menyatakan bahwa framing merupakan pokok pengorganisasian gagasan atau pemberitaan yang dapat memberikan sebuah makna terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi. Framing yang bersangkutan memberikan sebuah isyarat kepada khalayak tentang kontroversi apa yang sedang menjadi suatu pokok isu yang diberitakan (dalam Nugroho, 2014: 32). Produksi berita merupakan sebuah hasil dari konstruksi, sebagai konstruksi maka berita tersebut akan bernilai penting karena ada campur tangan dari media dan wartawan yang mengkonstruksi sebuah peristiwa. Untuk melihat sebuah realitas, mempunyai standar atau nilai yang digunakan wartawan atau media sehingga nilai yang ada sifatnya tidak personal. Namun sudah ada kesepakatan antara satu wartawan dan wartawan yang lainnya. Sehingga prinsip yang dipegang bersama menjadi satu kesepakatan dalam melihat suatu realitas. Prinsip ini yang membentuk frame dalam setiap pemberitaan media massa dan akan merefleksikan ideologi dari media massa (Pinontoan, 2020: 14).

Dalam berita *headline* edisi 5 Januari 2019, diketahui seperti ungkapan Gamson bahwa berita yang ada merupakan makna dari rangkaian peristiwa. Dalam hal ini Surat Kabar Harian Kompas memberikan sebuah klarifikasi atas pemberitaan pada edisi sebelumnya tanggal 4 Januari 2019 yang mengungkapkan kesalahan Andi Arief namun kemudian pada akhirnya dibantah sendiri dengan menyatakan sudah ada tersangka kasus penyebaran informasi hoax. Berita yang ditampilkan merupakan hasil konstruksi pada media tersebut, karena frame awal yang memojokkan Andi Arief kemudian pada berita berikutnya secara langsung menyatakan bahwa Andi Arief tidak bersalah. Jika dilihat dengan cermat, maka dapat disimpulkan Surat Kabar Harian Kompas membuat berita tidak sesuai dengan realitas pada awalnya dan mengkonstruksi sebuah peristiwa untuk disebarkan kepada khalayak.

Pada Undang-undang Pers pasal 3 ayat 1 dapat diketahui salah satu fungsi media massa dalam hal ini adalah surat kabar memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sebagai media informasi, Surat Kabar Harian Kompas seharusnya mampu memberikan informasi secara jelas dan akurat kepada khalayak.

### **Analisis Berita 3**

#### **3.3.1. Struktur Sintaksis**

*Headline* : Pemilih Tunggu Kampanye Programatik (7 Januari 2019)

Pada struktur sintaksis, Surat kabar Harian Kompas berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya informasi visi, misi dan program calon

presiden dan calon wakil presiden dengan melakukan survei pada 3 sampai 4 Januari 2019. Hasil dari survei tersebut menunjukkan hanya 33,93% responden yang mengetahui visi, misi dan program calon presiden dan wakil presiden. Disisi lain sebanyak 90% responden menyatakan bahwa pengetahuan tentang visi, misi dan program calon presiden serta calon wakil presiden penting dan sangat penting. Survei yang dilakukan Litbang Kompas ini diikuti oleh 501 responden dengan batas usia paling rendah 17 tahun yang berada di 16 kota besar di Indonesia. Latar dalam artikel Surat Kabar Harian Kompas menyatakan bahwa pemahaman program tidak hanya penting sebagai bahan pertimbangan memilih calon presiden dan calon wakil presiden namun bisa juga menjadi acuan dalam mengontrol pemerintahan yang terpilih.

Selain survei yang dilakukan, pernyataan narasumber yang berkompeten dibidangnya dipilih untuk memperkuat dalam penyusunan fakta. Narasumber yang pertama yaitu pengamat media sosial, Irendra Rajawali, Pengajar Psikologi Politik Universitas Atma Jaya Jakarta. Indro Adinugroho, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini dan sebagai narasumber kunci wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'aruf, Arsul Sani dan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar. Salah satu pernyataan yang mempertegas dalam artikel ini yaitu dari Titi Anggraini, bahwa masih kurangnya para pemilih mengetahui program dari calon presiden dan calon wakil presiden karena elite politik dan partai politik tidak mampu memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui peyebaran program.

Penutup dalam artikel ini mengutip pernyataan dari Arsul Sani, bahwa

“Informasi terkait program kerja disebarkan dengan kampanye tatap muka dengan para warga, namun yang dilihat hanya percakapan melalui media sosial atau berita media massa. Padahal penyampaian visi, misi dan program kerja lebih banyak di tingkat bawah”.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai pembelaan yang dilakukan oleh Arsul Sani yang menilai penyampaian visi, misi dan program dari calon presiden dan calon wakil presiden lebih megutamakan pertemuan tatap muka, bukan melalui media sosial atau media massa. Sehingga para calon pemilih dengan usia muda cenderung tidak mengetahui visi, misi dan program para kandidat.

Selain pernyataan dari Arsul Sani surat kabar harian Kompas juga memberikan pernyataan Dahnil Anzar, bahwa sisa 100 hari masa kampanye akan digunakan secara intensif untuk menjabarkan visi, misi dan program dengan menemui masyarakat di daerah. Selain itu akan ada bantuan dari tim sukses dan relawan yang bertemu secara langsung dengan pemilih. Hal tersebut membuktikan baik dari pihak calon presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih mementingkan kampanye dengan pertemuan secara langsung daripada kampanye melalui media massa atau media sosial dalam penyampaian visi, misi dan program para kandidat.

### **3.3.2 Struktur Skrip**

Surat Kabar Harian Kompas dalam mengisahkan fakta dengan menekankan beberapa unsur di dalamnya, unsur pertama yaitu *What* yang menjelaskan para pemilih menunggu kampanye mengenai program visi, misi dan program yang dimiliki oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil wakil presiden. Hal tersebut penting untuk memberikan pemahaman dan pertimbangan pada pemilu

yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Unsur *Who* menjelaskan dan menekankan dari pihak Joko Widodo dan Ma'aruf Amin yang disampaikan oleh Arsul Sani sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional bahwa kampanye dilakukan secara tatap muka lebih banyak dilakukan dibandingkan melalui media massa atau media sosial karena menilai masyarakat tingkat bawah juga membutuhkan banyak informasi dari calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih nantinya. Sedangkan yang disampaikan oleh Dahnil Anzar sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam sisa 100 hari kampanye akan meningkatkan intensitas kampanye tatap muka untuk menjelaskan visi, misi dan program.

Unsur *Why* dalam artikel ini menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tidak programatik. Masih banyak para pemilih yang belum mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Unsur *How* dijelaskan dalam kutipan yang disampaikan oleh Pengajar Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya, Indro Adinugroho bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden belum maksimal dikarenakan absennya ideologi politik dan adanya dominasi faktor ketokohan di Indonesia yang mengakibatkan isu yang dibahas bukan mengenai kebijakan yang penting.

Hal tersebut berbanding lurus dengan apa yang dicari oleh massa akar rumput karena bisa saja yang dianggap masyarakat terdidik tidak penting namun bagi massa akar rumput penting. Sehingga kampanye yang dilakukan lebih banyak secara tatap muka, karena massa akar rumput secara kuantitas merupakan

bagian terbesar dari populasi penduduk. Dalam mengisahkan fakta pada Surat Kabar Harian Kompas, unsur yang ada di struktur skrip masih belum lengkap dengan tidak adanya unsur *When* dan *Where*.

### **3.3.3 Struktur Tematik**

Wartawan dalam menuliskan berita pada artikel ini mencoba memberikan gambaran mengenai masih banyaknya calon pemilih yang belum mendapatkan informasi penting terkait visi-misi dan program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Elemen detail sebagai penekanan yang ditulis oleh wartawan terdapat pada paragraf 3 dan 4 yang memaparkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Selain itu bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf. Kata yang sering diulang dalam teks yang ditulis oleh wartawan adalah “pemilih, pemilu, capres dan cawapres” yang terletak pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 dan 14.

Surat Kabar Harian Kompas menuliskan berita sebanyak 14 paragraf dan kalimat yang digunakan cenderung tegas dan berani dalam mengungkapkan fakta. Hubungan antar kalimat satu dengan yang lain dalam artikel ini secara menyeluruh berkesinambungan. Tema yang diangkat dalam satu artikel berjumlah tiga yang pertama mengenai pemilih masih menunggu kampanye programatik dari para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang dibahas dari paragraf 1 sampai 7 kemudian tema kedua tentang absen ideologi yang dibahas pada paragraf 8 sampai 10 dan tema ketiga yaitu mengawasi kinerja pada paragraf 11 sampai 14.

### 3.3.4 Struktur Retoris

Pada struktur retorik terdapat pemilihan kata dan grafik. Pemilihan kata dalam menegaskan teks berita yaitu ‘programatik’, ‘virtual’, ‘terdistraksi’, dan ‘trivial’ sedangkan penggunaan grafik dipilih oleh wartawan untuk menekankan fakta yang ada. Grafik yang ditampilkan merupakan hasil dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Grafik terdapat pada halaman utama dengan judul “Kampanye capres dan cawapres” dengan pertanyaan dalam kampanye selama tiga bulan terakhir, informasi apa yang paling banyak anda peroleh mengenai kedua pasangan capres dan cawapres? Dan menunjukkan beberapa hasilnya, sebanyak 14,17% identitas calon (keluarga/keturunan, agama dll) selanjutnya 24,15% mengenai aktivitas atau kegiatan kampanye (kunjungan ke tokoh masyarakat/blusukan ke warga) dan hasil yang paling banyak 33% visi, misi dan program kerja.

Pada pertanyaan berikutnya membahas tahu atau tidak tahu mengenai visi, misi dan program kerja dari pasangan calon yang akan berlaga di pilpres 2019. Hasil yang diperoleh digambarkan dengan grafik sebanyak 59,08 menjawab tidak tahu dari pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’aruf Amin dan sebanyak 68,46 menjawab tidak tahu dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Secara keseluruhan isi artikel, Surat Kabar Harian Kompas ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa masih banyak pemilih yang belum mengetahui visi, misian program kerja calon presiden dan calon wakil presiden

dikarenakan kedua kandidat tidak memanfaatkan media massa dan media sosial dengan maksimal untuk berkampanye serta lebih memilih kampanye secara tatap muka yang kurang efektif karena jangkauannya yang kurang menyeluruh.

Berita pada edisi 7 Januari 2019 ini setelah dilakukan framing, diketahui hasilnya menggunakan konsep psikologi. Dalam hal ini adalah menitik beratkan kepada bagaimana seseorang melakukan proses informasi pada dirinya, bagaimana seseorang mengolah informasi untuk dirinya.

Mcquail mempunyai beberapa penjelasan mengenai peran media massa. Peran media massa yang dimaksud oleh Mcquail adalah sebagai berikut:

1. Sebagai jendela pengalaman yang mampu meluaskan pandangan dan memungkinkan khayalak untuk dapat memahami yang terjadi pada lingkungan sekitar, tanpa adanya campur tangan pihak lain atau sikap memihak.
2. Sebagai juru bahas artinya adalah mampu menjelaskan dan memberikan makna terhadap sebuah peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.
3. Sebagai pembawa informasi.
4. Sebagai jaringan yang interaktif, yaitu mampu menjadi penghubung dan penerima dari berbagai umpan balik.
5. Sebagai petunjuk jalan, artinya bahwa sebuah media massa secara aktif mampu menunjukkan arah, memberikan bimbingan dan sebagai media yang dapat memberikan instruksi.

6. Media massa sebagai penyaring artinya adalah dapat memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyingkirkan aspek pengalaman lain secara sadar dan sistematis atau tidak.
7. Sebagai cermin, bahwa media memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri namun biasanya pantulan citra tersebut mengalami perubahan karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh masyarakat.
8. Media massa juga bisa digambarkan sebagai tirai yang menutupi sebuah kebenaran demi sebuah pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (dalam Qudratullah, 2016: 43).

Dalam framing yang telah dilakukan, Surat Kabar Harian Kompas telah melakukan perannya sebagai media massa cetak bahwa sebagai juru bahas. Dalam hal ini mengenai berita dengan *headline* “Pemilih Tunggu Kampanye Programatik”. Menjelaskan mengenai kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum sepenuhnya mengkampanyekan visi-misi dan program kepada masyarakat luas. Hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian khalayak seperti yang diungkapkan oleh De Vito bahwa komunikasi massa mempunyai fungsi mempengaruhi. Macam-macam fungsi mempengaruhi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mengukuhkan atau memperkuat sikap setelah mengetahui atau melihat sebuah berita pada media massa.
2. Membuat semakin percaya karena adanya sebuah pemberitaan atau memberikan nilai pada seseorang.

3. Mampu mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang.
4. Dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
5. Dapat memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu  
(dalam Qudratullah, 2016: 44).

Pemberitaan yang disampaikan oleh Kompas dalam hal ini mampu mempengaruhi seseorang atau khalayak dalam mengambil sikap pada pemilihan umum pada bulan April tahun 2019.

### **3.4 Analisis Berita 4**

#### **3.4.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Detail Program Ekonomi Dinantikan (8 Januari 2019)

Surat Kabar Harian Kompas ingin memberikan gambaran kepada khalayak mengenai program ekonomi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan isu yang dianggap paling penting. Hal tersebut sesuai dengan judul *headline* yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas dan *lead* yang tertulis “Publik menganggap penting tawaran perbaikan ekonomi dari calon presiden dan calon wakil presiden. Sisa masa kampanye perlu digunakan mendetailkan tawaran itu”. Latar informasi yang ada pada edisi ini memberikan informasi mengenai hasil survei Litbang Kompas pada tanggal 3-4 Januari 2019 yang terdiri dari 501 responden di 16 kota besar di Indonesia dan hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya 40,32% responden yang mengetahui visi, misi dan program Jokowi-Ma’aruf dan 30,54% yang tahu program Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Survei Libang Kompas menyebutkan bahwa yang menjawab mengetahui visi, misi dan program Jokowi-Ma'aruf 24,55% menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program paling penting yang diikuti oleh peningkatan ekonomi dan kualitas manusia. Sedangkan yang mengetahui visi, misi dan program Prabowo-Sandiaga 18,56% menganggap peningkatan ekonomi sebagai program paling menarik diikuti dengan memperbanyak lapangan kerja. Dalam memperkuat artikelnya Surat Kabar Harian Kompas menuliskan kutipan pernyataan dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, "Sisa waktu kampanye, setiap pasangan calon perlu menyebarkan narasi detail agar tema yang dianggap penting seperti ekonomi lebih dipahami oleh publik dan publik juga perlu mengetahui dampak dari pembangunan yang telah dilakukan kedepannya, seperti apakah pembangunan infrastruktur akan mengungkit ekonomi atau memudahkan transportasi barang dan manusia".

Melengkapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Ramlan, Surat Kabar Harian Kompas juga memberikan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing calon kandidat. Ferry Juliantono sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengatakan, "Sisa masa kampanye akan mempertajam program kerja terutama penyediaan lapangan kerjadan pemenuhan harga kebutuhan yang terjangkau, serta menawarkan narasi programatik untuk mengubah persepsi terkait pembangunan infrastruktur. Bagi kami infrastruktur itu untuk menunjang produksi masyarakat, jadi bukan pembangunan fisik yang diharapkan mampu menghadirkan pusat pertumbuhan baru".

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma'aruf, Arsul Sani mengatakan akan menambah intensitas diskusi dan akan memanfaatkan konferensi pers yang diadakan di posko pemenangan Jokowi-Ma'aruf dengan membahas isu ekonomi dan infrastruktur kepada para calon pemilih. Selain itu untuk menjawab berbagai pertanyaan dan simpang siur informasi mengenai kinerja Jokowi di kedua bidang tersebut pada periode pertama pemerintahannya. Dari artikel yang ditulis oleh Surat Kabar Harian Kompas, bahwa dari unsur sintaksis ingin memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dengan menunjukkan survei yang telah dilakukan bahwa isu ekonomi merupakan isu yang penting untuk dibahas oleh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden namun pada kenyataannya isu ekonomi yang dianggap penting tersebut baru akan disosialisasikan kepada calon pemilih dengan sisa waktu yang ada bukan dari awal masa kampanye yang telah ditentukan.

### **3.4.2 Struktur Skrip**

Unsur pertama dalam struktur skrip adalah *What* yang menjelaskan mengenai publik atau para calon pemilih presiden dan calon wakil presiden yang sedang menantikan detail program ekonomi dari masing-masing kandidat untuk dibahas secara lengkap kedepannya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh Litbang Kompas. Unsur kedua adalah *Who*, menjelaskan dan ditegaskan oleh pernyataan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fery Juliantono yang akan menawarkan narasi programatik mengubah persepsi terkait pembangunan infrastruktur karena apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini tidak bermanfaat secara langsung kepada

masyarakat namun baru dapat dirasakan langsung dalam jangka waktu yang panjang. “Bagi kami infrastruktur itu untuk menunjang produksi masyarakat sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Jadi bukan pembangunan fisik yang diharapkan mampu menghadirkan pusat pertumbuhan baru”.

Kutipan pernyataan yang digunakan oleh Surat Kabar Harian Kompas dari pihak Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’aruf, Arsul Sani tidak dilakukan wawancara kembali namun mengambil pernyataan dari artikel pada tanggal sebelumnya yaitu 7 Januari 2019 dan hanya memberikan tiga baris pernyataan Sani yaitu “Isu ekonomi dan infrastruktur menjadi salah satu topik yang akan dibahas”. Namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai topik ekonomi atau infrastruktur seperti apa dari pihak Jokowi-Ma’aruf yang akan dibahas di depan para calon pemilih. Unsur *Who* dari pihak Jokowi-Ma’aruf menurut peneliti belum memenuhi kriteria karena sebagian besar mengambil informasi dari artikel sebelumnya.

Unsur *Why* dalam artikel ini menjelaskan sisa kampanye yang ada harus digunakan untuk menjelaskan detail program ekonomi masing-masing kandidat calon presiden dan calon wakil presiden agar lebih dipahami oleh publik. Unsur *How* ditegaskan dengan kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti bahwa dirinya mengingatkan di sisa waktu kampanye masing-masing calon pasangan perlu menyebarkan narasi detail agar tema yang dianggap penting seperti ekonomi lebih dipahami publik. Pasangan calon tidak cukup jika hanya memaparkan capaian atau target di permukaan, misalnya panjang jalan dan jembatan yang dibangun. Publik juga perlu

tahu dampak pembangunan itu ke depan, seperti apakah pembangunan infrastruktur akan mengungkit ekonomi atau memudahkan transportasi barang dan manusia. Dalam struktur skrip, Surat Kabar Harian Kompas masih belum lengkap karena tidak adanya unsur *When* dan *Where*.

### **3.4.3 Struktur Tematik**

Struktur tematik yaitu cara wartawan dalam menuliskan berita. Surat Kabar Harian Kompas ingin menjelaskan kepada khalayak bahwa pembahasan mengenai program ekonomi dari calon presiden dan calon wakil presiden sangat penting untuk melihat bagaimana program ekonomi selanjutnya yang akan dilakukan dan dampaknya untuk masyarakat luas karena hingga sisa masa kampanye ini baru merencanakan untuk membahas program ekonomi masing-masing kandidat. Elemen detail sebagai penekanan yang ditulis oleh wartawan terdapat pada paragraf 2,3 dan 4 yang memaparkan hasil survei Litbang Kompas dan hasilnya menempatkan isu ekonomi sebagai isu lebih tinggi daripada isu lain seperti kemiskinan, korupsi, lapangan kerja dan pengangguran. Bentuk yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf.

Surat Kabar Harian Kompas menuliskan berita sebanyak 12 paragraf dan kalimat yang digunakan cenderung tegas dan berani dalam menuliskan berita. Hubungan antar kalimat satu dengan yang lain dalam artikel ini secara menyeluruh berkesinambungan. Tema yang diangkat dalam satu artikel berjumlah dua yang pertama mengenai detail program ekonomi dinantikan oleh calon pemilih dan

dianggap isu penting yang perlu untuk diketahui yang dibahas pada paragraf 1 sampai 7. Tema kedua membahas mengenai pertarungan detail yang dibahas pada paragraf 8 sampai 12.

#### **3.4.4 Struktur Retoris**

Pada struktur retorik unsur pertama yaitu grafik pada halaman *headline* dipilih oleh penulis untuk menekankan fakta. Gambar karikatur Joko Widodo di sebelah kiri dan Prabowo Subianto di sebelah kanan. Judul pada grafik adalah “Program Kerja Kandidat Yang Paling Penting/Menarik (%)”. Hasil yang dituliskan diberi tanda untuk Jokowi-Ma’aruf warna orange dan ada di urutan pertama dan Prabowo-Sandiaga warna kuning di urutan kedua. Urutan hasil yang ditampilkan dari paling atas adalah pembangunan infrastruktur 24,55% dan 0,60%, Peningkatan ekonomi 8,98% dan 18,56%, Peningkatan Kualitas Manusia (Pendidikan) 4,59% dan 0,80%, Pembangunan dalam Bidang Kesehatan 2,99% dan 0,40%, Melanjutkan program yang sudah ada (kerja nyata) 4,39%, Memperbanyak lapangan kerja 3,39%, Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 1,40%, Mempertahankan kesatuan NKRI 0,60%. Dari pertanyaan yang diberikan kepada responden, sebanyak 9,38% dan 12,57% menjawab tidak ada, 41,12% dan 58,28% menjawab tidak tahu terakhir 2,59% dan 4,79% tidak menjawab.

Baris akhir pada grafik yang ditampilkan oleh Surat Kabar Harian Kompas menuliskan Metode Jajak Pendapat yang dilakukan secara rinci dengan keterangannya adalah pengumpulan pendapat melalui telepon yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Januari 2019. Responden yang digunakan sebanyak 501 dan dengan

minimal usia 17 tahun berbasis rumah tangga yang dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar di Indonesia yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makasar, Ambon dan Jayapura. Jumlah responden ditentukan secara proporsional pada setiap kota. Menggunakan metode dengan tingkat kepercayaan 95%, nirpencuplikan kurang lebih 4,4%. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 16 kota. Unsur kedua yaitu pemilihan kata, kata yang dipilih oleh redaksi yaitu ‘teror’, ‘hoaks’ dan ‘militansi internal’.

Artikel pada tanggal 8 Januari 2019 ini cenderung mengingatkan kepada kandidat calon presiden dan calon wakil presiden bahwa isu ekonomi harus dibahas lebih mendalam dan dikampanyekan pada masa sisa kampanye yang akan berakhir pada 13 April 2019. Selain itu, Surat Kabar Harian Kompas juga ingin memberitahukan kepada khalayak bahwa telah melakukan survei dan hasil survei tersebut sebagai landasan pentingnya program ekonomi dan infrastruktur yang belum dibahas secara detail.

Setelah framing yang dilakukan oleh peneliti, konsep framing yang ada pada berita ini adalah konsep psikologi. Bahwa berita yang disajikan kepada khalayak akan mempengaruhi seseorang dalam memproses dan mengolah informasi yang ada, karena inti dari berita yang dituliskan oleh *gatekeeper* adalah lebih mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membahas isu ekonomi karena sisa masa kampanye yang berakhir pada bulan April 2019.

Pendapat yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh Sobur, bahwa jika dilihat berdasarkan konsep psikologi, framing berada pada penempatan informasi dalam konteks yang unik. Sehingga elemen-elemen tertentu dari sebuah isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu yang lebih besar (dalam Herman, 2010: 157). Dalam hal ini psikologi seseorang ketika membaca informasi yang di dapatkan mampu memberikan pengaruh tersendiri yang kemudian akan diwujudkan menjadi sebuah tindakan atau bahkan tidak merespons informasi tersebut dengan tidak melakukan apa-apa.

### **3.5 Analisis Berita 5**

#### **3.5.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Jaga Komitmen Pemilu Damai (11 Januari 2019)

Surat Kabar Harian Kompas dalam beritanya ingin memberikan gambaran kepada khalayak mengenai komitmen pemilu yang harus berlangsung secara damai sesuai dengan *headlinenya* dan *lead* yang ditampilkan yaitu “Sejumlah kasus berpotensi mengganggu kedamaian pelaksanaan Pemilu 2019. Komitmen semua pihak untuk menjaga pemilu 2019 amat dinantikan”. Latar informasi juga menguatkan *lead* yang ada yaitu :

“Kurang dari dua minggu perjalanan tahun 2019 muncul sejumlah peristiwa yang jika tidak secepatnya diselesaikan dengan baik dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019. Terkait hal itu komitmen untuk menjaga dan mewujudkan pemilu yang damai ditunggu realisasinya”.

Harapan penulis dalam Surat Kabar Harian Kompas terlihat jelas dari *headline*, *lead* dan latar informasi yang dituliskan. Kasus pertama mengenai hoaks

tujuh kontainer surat suara dari China yang telah dicoblos dan sebelumnya juga telah digemparkan mengenai kasus Ratna Sarumpaet. Kemudian munculnya teror terhadap pimpinan KPK dan teror tersebut merupakan teror ke 9 yang belum bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Deretan kasus diatas berpotensi memunculkan dinamika menjelang pemilu 2019. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pernyataan yang disampaikan oleh Pramono Ubaid untuk semua pihak bisa menjaga Pemilu 2019 yang damai dan kembali mengingatkan terutama figur publik yang mendapatkan informasi mengenai tahapan pemilu sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan KPU. Selain Pramono Ubaid dalam artikel ini juga mempunyai beberapa narasumber yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas, yaitu Anggota Bawaslu M Afifudin, Hasto Kristiyanto dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Andre Rosiade sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Uung Sendana dan Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Albertus Patty.

Paragraf penutup dalam artikel ini memilih pernyataan Albertus Patty bahwa selain berbagai pihak yang diharapkan untuk menjaga komitmen damai dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, kasus sebelumnya yang telah muncul di berbagai media agar dapat di usut tuntas oleh kepolisian. Harus ada ketegasan sehingga tidak akan terjadi delegitimasi pemilu. Secara keseluruhan dalam artikel dengan unsur sintaksis dapat diketahui Surat Kabar Harian Kompas dalam

menyusun fakta sudah melengkapi beritanya dengan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya dan ingin menunjukkan gambaran pentingnya Penyelenggaraan Pemilu 2019 harus damai kepada khalayak.

### **3.5.2 Struktur Skrip**

Artikel yang ditulis oleh Surat Kabar Harian Kompas dalam struktur sintaksis dengan beberapa unsur di dalamnya ingin memberikan penjelasan mengenai kasus yang bermunculan sebelum penyelenggaraan pemilu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu jika tidak segera diselesaikan sehingga komitmen pemilu yang damai diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua pihak melalui kelengkapan berita yang disusun oleh Kompas. Unsur pertama dari kelengkapan berita yaitu *What*, dalam unsur ini penulis ingin mengisahkan fakta kepada khalayak bahwa komitmen untuk menjaga terselenggaranya pemilu 2019 dengan damai agar bisa dilakukan oleh semua pihak.

Unsur kedua yaitu *Who*, unsur ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pemilu 2019 yang damai, diharapkan pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus hoaks dan menindak tegas para pelaku tersebut yang disampaikan oleh narasumber Pramono Ubaid, “Kami berharap aparat penegak hukum menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, tidak peduli dari pihak manapun dan diharapkan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya”. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Andre Rosiade sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, “Kami mendukung kepolisian agar mengusut tuntas kasus hoaks terkait tujuh kontainer surat suara dari China”.

Unsur Ketiga yaitu *Where*, dari artikel ini dapat diketahui bahwa telah menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 oleh KPU. Unsur Keempat yaitu *When*, yang menjelaskan deklarasi kampanye diadakan pada 23 September 2018 di Jakarta yang dihadiri oleh calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan pimpinan partai politik. Unsur kelima yaitu *Why*, dalam unsur ini menjelaskan jika kasus-kasus menjelang pemilu tidak segera diselesaikan maka akan terjadi delegitimasi penyelenggaraan pemilu. Unsur keenam yaitu unsur *How*, yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bahwa kontestasi politik merupakan hal yang rutin dilaksanakan, jangan dibawa menjadi serba gawat darurat. Jangan dijadikan ajang pertarungan politik yang keras dan menghimbau untuk menjauhi sikap paling benar dalam politik. Perlu dipahami bahwa dengan politik merupakan jalan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sehingga seharusnya para politisi menggunakan keadaban dalam berpolitik dan menghindari praktik politik dengan menggunakan segala cara seperti adu domba, menebar kebencian, menyebar hoaks dan fitnah.

Struktur skrip yang ada atau sebagai kelengkapan berita dalam mengisahkan fakta kepada khalayak yang dituliskan oleh Surat Kabar Harian Kompas sudah memenuhi semua unsurnya. Namun untuk artikel 11 januari 2019 yang berkaitan dengan narasumber Haedar Nashir, pernyataan yang dituliskan mempunyai porsi yang lebih banyak yaitu 4 paragraf dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang lainnya yang masing-masing hanya 1 paragraf saja.

### **3.5.3 Struktur Tematik**

Struktur tematik yang dituliskan oleh wartawan dalam Surat Kabar Harian Kompas ingin memberikan gambaran kepada khalayak mengenai harapan komitmen penyelenggaraan pemilu 2019 damai bisa diwujudkan oleh semua pihak dengan menyelesaikan kasus-kasus yang sudah muncul terlebih dahulu seperti kasus hoaks surat suara yang sudah dicoblos dan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet. Bentuk yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf. Koherensi sebab akibat dijabarkan pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Kata yang sering diulang dalam artikel adalah komitmen, pemilu 2019, pemilu damai yang ada pada paragraf 1, 5, 6, 7 dan 8.

Elemen detail membahas deklarasi komitmen pemilu damai yang digelar oleh KPU dijabarkan pada paragraf 8, yang ditanggapi dengan baik oleh para tim pemenangan baik dari Jokowi-Ma'aruf dan Prabowo-Sandiaga yang siap menjaga pemilu berlangsung dengan damai. Artikel yang ditulis oleh Surat Kabar Harian Kompas sebanyak 22 paragraf dengan tema yang isinya berkesinambungan dengan judul *headline* yaitu menjaga komitmen pemilu 2019 damai. Hubungan antar kalimat satu dengan yang lain dalam artikel ini secara menyeluruh berkesinambungan dan ditampilkan dengan kalimat yang lugas dan cerdas.

### **3.5.4 Struktur Retoris**

Struktur retorik menjelaskan pemilihan kata yang digunakan wartawan untuk menekankan arti tertentu di dalam teks. Dalam struktur ini, ingin melihat pemilihan

kata, idiom, grafik atau gambar yang dituliskan oleh wartawan. Penekanan kata yang dipilih adalah “ditunggu realisasinya” kata tersebut menekankan kalimat sebelumnya yang membahas awal tahun 2019 perjalanan pemilu muncul kasus yang jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu pelaksanaan pemilu sehingga komitmen untuk menjaga pemilu damai diharapkan dilakukan oleh semua pihak. Kata lain yaitu “ironis” yang terdapat pada kalimat sebagai berikut:

“Pada rabu dini hari lalu terjadi teror terhadap rumah dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode M Syarif dan teror tersebut merupakan teror ke sembilan, ironisnya dari teror-teror tersebut belum ada yang diungkap oleh pihak kepolisian”.

Kutipan pernyataan diatas menjelaskan bahwa teror yang dialami oleh KPK telah berlangsung lama dan tidak pernah ada ketegasan dari pihak kepolisian, kata ironis dalam kalimat tersebut menunjukkan kejadian yang seharusnya tidak diharapkan namun berulang terus-menerus. Unsur lain dalam struktur retorik adalah grafik atau gambar, namun Surat Kabar Harian Kompas tidak memberikan grafik atau gambar pada artikel 11 Januari 2019.

Analisis framing yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa konsep framing pada berita 11 Januari 2019 adalah konsep psikologi, dengan *headline* “Jaga Pemilu Damai” isi berita yang ditampilkan adalah mengajak semua lapisan masyarakat berkomitmen untuk menjaga pemilu yang akan segera terlaksana dengan tenang dan damai.

Menurut Laily penulisan berita yang berlandaskan prinsip pembedaan mampu mewujudkan tulisan yang jelas dan komunikatif saat melakukan strategi

pembingkaiian pada pesan, yaitu dengan cara menggaris bawahi dan menonjolkan perspektif penulis pada gagasan inti pemberitaan agar pembaca juga terpengaruh pada ideologi penulis. Keterampilan jurnalistik merupakan salah satu kemampuan dalam membingkai pesan sedemikian rupa agar menarik dan mudah dicerna oleh akal pikiran pembaca atau khalayak. Karena itu banyak keterampilan untuk memainkan kata-kata agar bisa menimbulkan kesan dan makna yang berarti dalam pikiran pembaca (dalam Waluyan, 2018: 4). Dalam hal ini tulisan Kompas ingin mengajak para pembaca untuk saling menjaga sikap dalam kontestasi politik ini. Diharapkan dengan sikap saling menjaga dapat mewujudkan pemilihan umum yang diinginkan oleh semua pihak yaitu pemilu yang damai.

### **3.6 Analisis Berita 6**

#### **3.6.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Kualitas Debat Pengaruhi Pemilih (17 Januari 2019)

Latar informasi pada struktur sintaksis yang dijelaskan oleh Surat Kabar Harian Kompas menunjukkan bahwa penampilan para calon presiden dan calon wakil presiden dalam acara debat yang berlangsung pada tanggal 17 Januari pukul 20.00-22.00, dapat mempengaruhi elektabilitas pasangan kedua calon. Hal tersebut bisa terjadi karena masih banyaknya calon pemilih yang mengambang atau masih belum menentukan pilihannya. Perangkat lain dalam struktur ini adalah *lead*. *Lead* yang ditampilkan oleh Surat Kabar Harian Kompas menjelaskan setiap pasangan calon peserta pemilihan presiden 2019 menyiapkan secara serius penampilannya dalam

debat hari ini. Karena pengaruh dari debat terhadap elektabilitas bisa menyentuh angka 5-6 persen.

Terkait dengan elektabilitas pada saat debat berlangsung, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyatakan :

“Kedua pasangan calon perlu memakai momentum debat hari ini untuk menyosialisasikan gagasan dan tawaran program kerjanya kepada publik, terutama pada kelompok pemilih mengambang atau yang belum menentukan pilihan yang umumnya merupakan pemilih rasional”.

Kutipan lainnya yang ditampilkan oleh Surat Kabar Harian Kompas adalah hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018 yang melibatkan 1.200 responden, dengan margin kesalahan +/- 2.8 persen, menunjukkan ada 14.7% responden yang merahasiakan atau belum menentukan pilihan. Selain itu ada sekitar 30% pemilih pada kedua pasangan calon masih bisa berubah pikiran. Selain hasil jajak pendapat dan peneliti dari CSIS, Arya Fernandes yang menjadi sumber informasi, ada beberapa orang yang dipilih Surat Kabar Harian Kompas menjadi narasumbernya yaitu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf Arsul Sani dan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade.

Perangkat penutup dalam struktur sintaksis menjelaskan mengenai cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu yang akan disampaikan oleh calon presiden Prabowo dan calon wakil presiden Sandiaga. Bahwa keduanya akan mengajak berbicara para korban dan penegak hukum, langkah tersebut

bertujuan untuk menentukan langkah penyelesaian kasus HAM pada masa lalu, misalnya melalui pengadilan HAM atau rekonsiliasi. Dengan adanya cara penyelesaian tersebut diharapkan kasus hak asasi manusia pada masa lalu tidak lagi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di masa mendatang.

Secara keseluruhan dari isi artikel dengan stuktur sintaksis, Surat Kabar Harian Kompas ingin memberikan gambaran kepada khalayak bahwa dengan diadakannya debat para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden harus dimanfaatkan dengan baik dan memberikan informasi secara detail mengenai visi-misi dan tawaran program kerja yang akan dilakukan kedepannya jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kualitas debat yang akan dilakukan hingga lima kali diharapkan mampu meyakinkan bagi calon pemilih yang masih belum menentukan pilihannya.

### **3.6.2 Struktur Skrip**

Kelengkapan berita yang terdapat pada artikel ini terbagi dalam beberapa unsur, Surat Kabar Harian Kompas berupaya mengisahkan fakta dengan unsur yang pertama adalah *What*, bahwa kualitas debat para calon presiden dan calon wakil presiden dapat mempengaruhi para calon pemilih yang masih belum menentukan pilihannya. Unsur kedua yaitu *Who*, para pembicara dari calon kandidat presiden dan calon wakil presiden yang masing-masing di wakikan oleh Arsul Sani dan Andre Rosiade. Debat yang akan dilakukan pada 17 Januari ini menurut Arsul Sani, Jokowi-Ma'aruf akan menyampaikan komitmennya untuk tidak mengganggu kewenangan KPK dengan merevisi undang-undang. Untuk masalah pelanggaran

HAM, akan menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah kasus dan berkomitmen untuk melanjutkan upaya penuntasan kasus tersebut.

Sedangkan menurut Andre Rosiade, Prabowo-Sandiaga berkomitmen akan memperkuat dukungan kepada KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Lembaga Kehakiman. Kasus Novel Baswedan merupakan prioritas dalam kinerja 100 hari masa kepemimpinannya. Pihaknya akan membuka dan memproses hukum pihak yang melindungi para pelaku penyiraman terhadap Novel yang terjadi pada April tahun 2017. Yang terakhir mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, Prabowo-Sandiaga akan mengajak berbicara para korban dan penegak hukum dalam menentukan penyelesaian kasus hak asasi manusia.

Unsur ketiga yaitu *When*, debat pertama yang akan dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 20.00-22.00. Unsur keempat yaitu *Where*, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Unsur kelima adalah *Why*, kualitas debat presidensial yang akan dilakukan pertama kalinya ini dapat mempengaruhi para calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Unsur keenam adalah *How*, pada debat pertama ini para calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan mampu memberikan penjelasan detail mengenai penuntasan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia hingga kasus terorisme dan membahas isu kunci yang sedang menjadi perhatian publik.

### **3.6.3 Struktur Tematik**

Cara wartawan dalam menuliskan berita pada struktur tematik dapat diketahui dengan tema yang diangkat yaitu satu dan dari keseluruhan teks terdapat

18 paragraf. Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat deduktif dengan inti teks yang ada di akhir paragraf. Koherensi sebab-akibat dinyatakan oleh Jusuf Kalla pada paragraf 5 dan 6 yang berkaitan dengan elektabilitas para pasangan calon jika berhasil dalam debat presidensial pada 17 Januari 2019.

Selain itu proporsisi pada teks berita dijelaskan oleh wartawan dengan memberikan data jajak pendapat yang telah dilakukan oleh Litbang Kompas sehingga pernyataan yang diberikan dapat di pertanggungjawabkan. Jajak pendapat tersebut telah dilakukan pada 24 September - 5 Oktober 2018 dan 9 - 10 Januari 2019 yang masing-masing terdapat pada paragraf 6 dan 9. Elemen detail membahas tentang masing-masing kandidat yang sudah mempersiapkan materi debat dengan matang, sesuai dengan tema yang dijelaskan pada paragraf 11 sampai paragraf 18. Hubungan antar paragraf dari awal hingga akhir paragraf disusun dengan rapi sehingga para khalayak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh Surat Kabar Harian Kompas. Berita yang disampaikan digambarkan secara detail untuk memberikan kesan totalitas dalam penulisan sebuah artikel.

#### **3.6.4 Struktur Retoris**

Cara wartawan menekankan fakta pada artikel ini berkaitan dengan pemilihan kata di beberapa unsur dalam struktur retorisi, idiom yang dipilih oleh wartawan cenderung menggunakan kata yang menarik yang berkesinambungan dengan setiap tema yang dibahas. Seperti kata ‘pemilih mengambang’ dan ‘elektabilitas’ yang diulang beberapa kali dalam teks berita. Penegasan isi yang

dibahas dalam edisi 17 Januari yaitu ingin menekankan fakta bahwa debat akan mampu membuat elektabilitas dari pasangan calon cenderung naik jika mampu meyakinkan para calon pemilih dengan berbicara sesuai dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya seperti isu penegakan hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme. Sebaliknya, elektabilitas akan cenderung turun jika para calon presiden dan calon wakil presiden melakukan kesalahan seperti salah ucap atau salah memberikan data kepada khalayak.

Seperti kutipan yang disampaikan oleh Jusuf Kalla yang pernah mengikuti debat presidensial pada tahun 2004, 2009 dan pemilu tahun 2014 sebagai berikut :

“Pengaruhnya terhadap elektabilitas bisa mencapai 5-6 persen jika berhasil meyakinkan para calon pemilih namun jika gagal, apalagi salah ucap maka akan hilang elektabilitas tersebut sebesar 5-6 persen dukungan suaranya”.

Penekanan fakta yang ditunjukkan oleh Surat Kabar Harian Kompas juga mengacu pada jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas dan dilakukan pada 9-10 Januari 2019 dengan 527 responden di 17 kota besar di Indonesia. Mayoritas responden berharap penyelesaian kasus korupsi besar menjadi prioritas oleh kedua pasangan calon. Isu lain yang disoroti oleh responden adalah penuntasan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat pada masa laludan pemberantasan terorisme. Unsur lain yang ada dalam struktur retorik yaitu grafik, foto atau gambar yang tidak disertakan oleh Surat Kabar Harian Kompas. Secara garis besar informasi yang ingin disampaikan oleh Kompas dengan penekanan fakta di dalamnya, bahwa debat yang pertama kali berlangsung dapat membahas isu-isu

penting yang sedang mendapat perhatian khalayak. Namun pada edisi ini tidak ada grafik atau foto yang ditampilkan oleh Surat Kabar Harian Kompas.

Analisis framing yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsep framing yang ada adalah konsep psikologis. Berita *headline* pada edisi ini menekankan bahwa isu-isu yang dipilih dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mempengaruhi pemilih. Akan meyakinkan yang sudah menentukan pilihannya dan akan mendapatkan pemilih baru jika debat yang berlangsung dapat mempengaruhi pemikiran para calon pemilih.

Sosiolog Erving Goffman mengatakan frame adalah struktur kognitif yang memandu persepsi dan presentasi tentang realitas. Frame menunjukkan *Schemata of Interpretation* yang memungkinkan seseorang untuk meletakkan, mempersepsikan, mengidentifikasi dan memberikan label pada sebuah peristiwa kehidupan bahkan dunia secara umum. Kunci dari argumen Goffman adalah bahwa dalam analisis framing seorang individu dapat merasakan kehidupan sehari-hari dengan *devising frame* yang membentuk dan membagi pengalaman mereka serta membantu mereka menjelaskan bidang objek peristiwa yang ada disekitar mereka (dalam Karman, 2012: 31-32).

Pada isi berita *headline* 17 Januari 2019 seperti yang dikatakan oleh Goffman bahwa apa yang ditulis oleh Surat Kabar Harian Kompas mampu memandu persepsi pembaca dan mempresentasikan realitas atas debat calon presiden dan calon wakil presiden yang telah berlangsung. Bahwa isi debat dapat meyakinkan para calon pemilih yang masih mengambang. Isi berita lebih banyak

membahas mengenai cara penuntasan masalah-masalah yang sedang terjadi ataupun seperti HAM pada masa lalu yang belum secara tuntas diselesaikan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para pembaca dalam pemilihan umum pada bulan April 2019.

### **3.7 Analisis Berita 7**

#### **3.7.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Capres Belum Saling Mengapresiasi (18 Januari 2019)

Penyusunan fakta yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Kompas dalam struktur sintaksis dapat diketahui dari beberapa unsur. Dengan judul *headline* seperti diatas *lead* yang dijelaskan yaitu “Meski Tak Ada Ucapan Apresiasi, Para Kandidat Menunjukkan Sikap Saling Menghargai Selama Debat. Namun Narasi Yang Ditawarkan Dinilai Belum Memunculkan Kebaruan”. Pada teks berita ini latar informasi menjelaskan kepada khalayak bahwa debat yang telah berlangsung pada tanggal 17 Januari 2019, kedua pasangan calon menunjukkan sikap saling menghargai satu sama lain dengan saling bersalaman dan berpelukan meskipun tidak ada kata apresiasi yang keluar dari masing-masing pasangan calon dan hal tersebut dilakukan saat sesi debat belum ditutup oleh moderator.

Pada teks berita selain memberikan kutipan pernyataan-pernyataan yang muncul pada saat debat, ada beberapa narasumber yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas diantaranya adalah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Ketua

Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Sudirman Said, Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin Erick Thohir, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dan Abdul Kadir Karding dari TKN Jokowi-Ma'aruf.

Setelah debat berlangsung pernyataan dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa tidak adanya unsur kebaruan dalam gagasan yang disampaikan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Saut Situmorang,

“Keduanya masih sangat normatif, tidak ada yang inovatif karena masalah korupsi bukan *law* saja tapi juga order. Mungkin karena keterbatasan waktu sehingga pemaparan tidak terelaborasi dengan baik”.

Pernyataan yang lain juga diungkapkan oleh Aditya Perdana,

“Para calon cenderung bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif sehingga narasi yang disampaikan belum atraktif. Soal korupsi misalnya, pertanyaan mengenai korupsi di tubuh parpol belum bisa dijawab baik oleh kedua paslon”.

Firman Noor dan Choirul Anam memberikan pernyataan yang serupa bahwa, “Tidak ada tawaran yang konkret dan menilai kisi-kisi debat mengganggu para paslon sehingga tidak bisa tampil alamiah”. Dari sebagian besar narasumber yang menyatakan tidak ada gagasan atau hal baru yang diungkapkan oleh kedua pasangan calon saat debat berlangsung, pada paragraf penutup Surat Kabar Harian Kompas memberikan pernyataan sanggahan dari para calon presiden dan calon

wakil presiden. Sudirman Said menyatakan, bahwa pihak kami (Prabowo-Sandiaga) telah menyampaikan gagasan baru”. Erick Thohir juga mengatakan, “Jokowi-Ma’aruf selalu memberikan solusi kepada masyarakat dalam setiap pernyataan dan kampanyenya. Selain itu Surat Kabar Harian Kompas menambahkan pernyataan dari Abdul Kadir Karding pada paragraf terakhir yang menyatakan, “Pelukan itu menunjukkan kedekatan hubungan di antara keduanya. Sikap mereka dinilai lebih berarti daripada ucapan langsung”. Dengan memberikan pernyataan penegasan dari Abdul Kadir, menurut peneliti Surat Kabar Harian Kompas ingin memberikan gambaran kepada khalayak posisi sebagai media yang sedikit memberikan dukungan kepada pasangan calon Joko Widodo – Ma’aruf Amin.

### **3.7.2 Struktur Skrip**

Wartawan dalam mengisahkan fakta menggunakan unsur 5W+1H, masing-masing calon presiden belum saling mengapresiasi dan narasi yang ditawarkan dinilai belum memunculkan kebaruan masuk ke dalam unsur *What*. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai unsur *Who*. Unsur ketiga *When* yaitu debat yang telah berlangsung sehari sebelumnya pada 17 Januari 2019. Unsur *Where* yaitu Hotel Bidakara. Unsur *Why* menjelaskan kepada khalayak bahwa meski sudah dipersilahkan oleh moderator untuk saling mengapresiasi, kedua pasangan calon tidak melakukannya dengan kata-kata namun sikap saling menghargai ditunjukkan dengan bersalaman dan berpelukan ditengah-tengah sesi debat yang belum ditutup

oleh moderator. Gagasan-gagasan yang dimunculkan dalam debat dinilai tidak jauh berbeda dari debat presidensial sebelumnya pada lima tahun yang lalu.

Unsur keenam yaitu *How*, yang dikutip dari pernyataan Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat berlangsung. Jokowi-Ma'aruf memberikan lima tawaran terkait pemberantasan korupsi, yaitu penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sinergi Kejaksaan, KPK dan Polri. Selain itu, tawaran perekrutan aparatur berbasis seleksi terbuka untuk menghindari nepotisme. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga menawarkan tiga hal untuk memberantas korupsi yaitu, penguatan Lembaga KPK, serta pembenahan aset negara agar tidak disalahgunakan aparatur dan meningkatkan penghasilan aparatur negara termasuk penegak hukum. Secara keseluruhan dalam struktur skrip, Surat Kabar Harian Kompas telah memenuhi kerangka unsur 5W+1H yang telah dijelaskan pada paragraf diatas.

### 3.7.3 Struktur Tematik

Pada struktur tematik, keseluruhan teks dapat diketahui berjumlah 21 paragraf yang saling berkesinambungan dengan tema yang diangkat. Koherensi pembeda terdapat pada paragraf 1 dengan kata sambung 'padahal' yang dapat dilihat pada teks berikut:

“Debat presidensial Pemilu 2019 perdana Kamis (17/1/2019) malam, antara Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berakhir tanpa saling apresiasi dari dua pasangan calon presiden. **Padahal** ucapan saling apresiasi ini sempat diingatkan oleh para moderator debat”.

Kata padahal jika dijabarkan mempunyai makna bahwa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah diingatkan oleh moderator untuk saling memberikan ucapan apresiasi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh keduanya. Kata padahal dipilih sebagai bentuk penyampaian fakta kepada khalayak. Selanjutnya terdapat koherensi penjelas untuk menghubungkan paragraf 1 ke paragraf 2 dengan kata-kata ‘kendati begitu’ ‘bahkan’ dan ‘akibatnya’ yang terdapat pada kutipan:

“**Kendati begitu**, kedua pasangan menunjukkan relasi yang ‘cair’. Hal ini antara lain terlihat saat Jokowi-Ma’aruf dan Prabowo-Sandiaga yang langsung bersalaman dan berpelukan, **bahkan** sebelum moderator menutup sesi debat, **akibatnya** menjadi rileks kembali”.

Kata pada kutipan paragraf ‘kendati begitu’ merupakan kata penghubung yang menjelaskan hal yang dilakukan oleh kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang secara langsung bersalaman dan berpelukan menjelaskan sikap yang walaupun tidak saling berucap apresiasi pada paragraf 1. Kata ‘bahkan’ memberikan penegasan bahwa sesi debat belum selesai namun sikap ramah-tamah sudah ditunjukkan kedua pasangan. Kata penghubung berikutnya yaitu akibatnya merupakan hasil dari suatu peristiwa yang telah dilakukan. Dengan bersalaman dan berpelukan suasana debat berubah menjadi rileks dan tidak tegang. Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf. Kalimat proporsisi yang ada pada teks berita dijelaskan oleh Surat Kabar Harian Kompas pada paragraf 7.

### 3.7.4 Struktur Retoris

Penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dapat dilihat dengan pemilihan kata pada teks berita seperti ‘narasi’, ‘elaborasi’, ‘terobosan’, ‘paslon’, ‘realistis’ dan ‘normatif’. Penegasan isi terkait gagasan yang disebutkan oleh calon presiden sesuai dengan tema pada debat terdapat pada paragraf 5 dan 7 yang masing-masing dikutip oleh Surat Kabar Harian Kompas yaitu, “Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kompetensi, bukan nepotisme atau finansial. Oleh sebab itu rekrutmen pejabat birokrasi harus dilakukan transparan, sederhana dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyederhanaansistem sehingga menjadi murah”. Pada paragraf 7 berisi tentang, “Akar masalahnya ialah penghasilan pegawai negeri dan birokrat itu kurang, tidak realistis. Saya akan memperbaiki kualitas hidup seluruh birokrasi dengan realistis”.

Unsur foto dan grafik yang ditampilkan oleh Kompas pada halaman utama terlihat para calon presiden dan calon wakil presiden dalam 2 foto, Joko Widodo yang berdampingan dengan Ma’ruf Amin memakai kemeja berwarna putih dan memakai peci berwarna hitam sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kompak memakai setelan jas berdasi merah dan peci berwarna hitam. Kemudian disebelah kanan bawah terdapat foto Joko Widodo yang sedang bersalaman dengan Prabowo Subianto dengan keterangan sedang melakukan ramah-tamah sebelum mengikuti debat. Pada bagian bawah terdapat grafik dengan judul Perbandingan Debat Capres-Cawapres Tahun 2014 dan 2019 dengan tema Hukum, HAM,

Korupsi dan Terorisme serta menjelaskan masing-masing gagasan yang dipaparkan oleh Joko Widodo dan Prabowo.

Pada berita *headline* edisi 18 Januari 2019, yang telah dilakukan framing oleh peneliti menunjukkan bahwa

Analisis yang telah dilakukan pada berita *headline* menunjukkan bahwa konsep framing yang terlihat adalah konsep framing sosiologis karena isi berita yang ingin ditampilkan kepada khalayak bahwa sikap ramah-tamah yang dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden mengurangi rasa ketegangan debat yang telah berlangsung.

Frame dalam berita yang muncul mempunyai dua level. Yang pertama adalah tentang konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian tentang sebuah peristiwa. Frame dari berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, dan citra yang ada dalam narasi berita. Sehingga frame dapat diketahui dan diselidiki dari kata, citra dan visual atau gambar tertentu yang nantinya memberi makna tertentu dari sebuah teks yang baru. Kosa kata dan gambar tersebut kemudian ditekankan dalam sebuah teks sehingga lebih menonjol dibandingkan pada bagian lain teks. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengulangan, penempatan yang lebih menonjol atau menghubungkan dengan bagian lain dalam teks berita. Sehingga bagian tersebut lebih menonjol, lebih mudah diingat, dilihat dan lebih mempengaruhi khalayak. Secara luas definisi pada

masalah menyertakan konsepsi di dalamnya dan skema interpretasi wartawan (Mustika, 2017: 139).

Pada isi berita *headline* 18 Januari 2019, dapat diketahui hal yang ditonjolkan adalah sikap para kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belum saling mengapresiasi dalam kata-kata namun dilakukan dengan tindakan. Sikap saling berpelukan dimaknai sebagai hal yang lebih penting daripada ucapan. Pada hal ini Surat Kabar Harian Kompas ingin menggambarkan kepada khalayak bahwa sikap yang dilakukan oleh kedua pasangan lebih baik dari sekadar ucapan. Penonjolan kata dan pengulangan kata yang dilakukan untuk membangun pengertian kepada khalayak mengenai sebuah peristiwa yang terjadi pada debat calon presiden dan calon wakil presiden. Namun jika dicermati dalam teks tersebut penggunaan kata atau kalimat cenderung berpihak pada pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'aruf Amin.

### **3.8 Analisis Berita 8**

#### **3.8.1 Struktur Sintaksis**

*Headline* : Caleg Pakai Data Digital (30 Januari 2019)

Pada struktur sintaksis memuat beberapa unsur skema berita seperti judul *headline* diatas dan *lead* yang dipaparkan oleh Surat Kabar Harian Kompas berisi tentang “Sejumlah Calon Legislator dan Partai Politik Memakai Data Raksasa Untuk Menyusun Strategi Kampanye. Popularitas Diri Jadi Tujuan Utama Caleg Berkampanye di Media Sosial.” Pada unsur berikutnya adalah latar informasi yang menjelaskan mengenai partai politik dan calon anggota legislator menggunakan *big*

*data* yang sumbernya dari media sosial untuk menyusun kampanye digital. Walaupun belum diketahui secara pasti efektivitasnya di Indonesia, kampanye melalui media sosial dinilai lebih murah daripada kampanye dengan menggunakan alat peraga.

Beberapa calon anggota legislator mengakui dengan menggunakan data digital, dapat menekan biaya kampanye. Ketua DPR Bambang Soesatyo yang maju kembali di Pileg 2019 dari daerah pemilihan Jawa Tengah menyatakan, “Waktu dan biaya yang saya keluarkan lebih sedikit dibandingkan melakukan kampanye dengan sistem *door to door* atau mobilisasi massa”. Selain dengan data digital, kampanye secara tatap muka dinilai masih memiliki peran yang penting. Seperti yang disampaikan oleh Calon Legislatif DPR Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, Hidayat Nur Wahid, “Yang paling penting bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi meskipun ada *big data*, kami pakai itu hanya sebagai bagian konfirmasi atau penajaman kampanye”.

Data digital saat ini yang digunakan oleh partai politik dan calon anggota legislatif memang belum menjadi jaminan pasti akan menang dalam kampanye namun mempunyai potensi yang cukup baik terutama bagi para calon pemilih milenial. Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Partai Golkar Rizal Malaranggeng menyatakan, “Ini cara baru, belum tentu (berhasil). Namun kalau bisa memanfaatkan teknologi secara efektif, kami yakin hasilnya sangat kuat”. Disisi lain, pemanfaatan media sosial oleh para calon legislatif ternyata hanya untuk mengunggah foto, informasi mengenai nomor urut, daerah pemilihan dan belum mengunggah narasi tertentu untuk berinteraksi dengan publik.

Pada paragraf penutup Surat Kabar Harian Kompas mengutip pernyataan Peneliti Bandung Fe *Institute* Hokky Situngkir, “Sebenarnya seberapa besar *trending topic* itu memengaruhi pilihan politik? Karena sampai saat ini belum ada kajian yang pasti mengenai hal itu”. Pada keseluruhan teks berita, Kompas ingin memberitahukan kepada khalayak bahwa penggunaan big data untuk kepentingan politik baik partai politik atau individual sebagai calon legislaif masih belum ada bukti yang nyata atau penelitian yang menyatakan efektivitasnya untuk mendongkrak popularitas bagi para calon pemilih.

### **3.8.2 Struktur Skrip**

Struktur skrip mempunyai beberapa unsur untuk melihat kelengkapan berita melalui 5W+1H yang ada di dalamnya. Yang pertama menjelaskan mengenai beberapa partai politik dan calon anggota legislatif menggunakan *big data* yang bersumber dari media sosial untuk menyusun kampanye secara digital masuk ke dalam unsur *What*. Yang menggunakan *big data* sebagai strategi dalam mendongkrak popularitas partai maupun individual, dijelaskan dalam teks berita yaitu Partai Golkar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Calon Legislatif DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid dan Calon Legislatif DPR dari Dapil Jawa Barat yang juga dari Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa, sebagai unsur *Who*. 30 Januari 2019 sebagai unsur *When* dan tidak ada unsur *Where* dalam teks berita ini.

Pada unsur *Why* dijelaskan dengan kutipan pernyataan dari Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Partai Golkar, Rizal Mallaranggeng,

bahwa Golkar memperoleh data digitalnya dari media sosial seperti facebook dan aplikasi yang sering dipakai untuk menyebarkan pesan kampanye adalah *facebook* dan Instagram. Perubahan sikap pemilih bisa terjadi dari kedua media sosial tersebut namun tidak dengan *twitter* karena pengaruhnya tidak begitu besar. Dengan memanfaatkan big data, jumlah pemilih milenial Golkar terus meningkat sejak kampanye yang dilakukan pada tahun 2018.

Unsur terakhir yaitu unsur *How* yang menjelaskan, dengan adanya big data, salah satu keuntungan yang dirasakan oleh partai politik dan para calon legislatif yaitu karena biaya yang dikeluarkan cenderung lebih murah daripada kampanye menggunakan alat peraga konvensional. Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dengan kisaran harga 20 juta dirinya sudah mendapatkan data mentah pengguna *facebook* dan Instagram di daerah pemilihannya. Sedangkan Hidayat Nur Wahid mengeluarkan biaya tidak lebih dari 200 juta untuk kampanye berbasis digital, biaya tersebut sudah termasuk membeli, mengolah dan menganalisis *big data* serta membayar anggota tim yang menjalankan kampanye. Ledia Hanifa calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan dana Rp 10.000 per hari selama 6 bulan terakhir dan memasang 6-7 iklan dengan durasi tayang masing-masing 10 hari.

### **3.8.3 Struktur Tematik**

Pada struktur tematik, artikel yang ditujukan kepada khalayak secara keseluruhan mempunyai 27 paragraf dengan tema utama yaitu *big data* yang digunakan oleh para calon legislatif sebagai senjata dalam menyusun strategi

kampanye. Kalimat yang ada dalam paragraf awal hingga paragraf akhir saling berkesinambungan sesuai dengan tema serta cenderung menggunakan kata-kata lugas oleh Surat Kabar Harian Kompas. Seperti pada paragraf 1 terdapat koherensi penjas dengan kata penghubung ‘meski’ yang terdapat pada kutipan sebagai berikut :

“Sejumlah partai politik dan calon anggota legislatif menggunakan data raksasa (*big data*) yang antara lain bersumber dari media sosial untuk menyusun kampanye digital. **Meski** efektivitasnya belum teruji secara pasti di Indonesia, kampanye digital ditengarai lebih murah dibandingkan dengan kampanye konvensional, seperti dengan memakai alat peraga kampanye.

Kata sambung ‘meski’ digunakan sebagai koherensi penjas dengan kalimat sebelumnya yang mempunyai makna bahwa penggunaan *big data* belum mempunyai bukti yang konkret di Indonesia sebagai cara atau strategi kampanye yang efektif, namun *big data* telah dimanfaatkan oleh beberapa partai politik dan calon anggota legislatif. Pada paragraf ke 2 terdapat pula koherensi penjas ‘dan’ yang ada pada kutipan sebagai berikut :

“Partai Golkar menjadi salah satu partai yang serius memanfaatkan data raksasa. Data raksasa itu diolah **dan** dianalisis, lalu dipakai untuk menyusun strategi serta konten kampanye yang spesifik untuk setiap pemilih”.

Pada kutipan paragraf diatas, kata ‘dan’ menjelaskan kalimat sebelumnya bahwa, data raksasa serius dimanfaatkan oleh salah satu partai besar yaitu partai Golkar. Data raksasa melalui beberapa tahapan sehingga bisa digunakan untuk kampanye digital. Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf.

### 3.8.4 Struktur Retoris

Struktur retorik atau penekanan fakta yang digunakan dapat diketahui dari pemilihan kata dan unsur grafik atau gambar yang dipilih. Beberapa pemilihan kata pada teks berita yang ada seperti, ‘data raksasa’, ‘realitas virtual’, ‘big data’, ‘pemilih milenial’, ‘medsos’, ‘*trending topic*’, ‘*profiling*’ dan ‘dapil’. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan oleh Surat Kabar Harian Kompas melalui penekanan fakta lainnya adalah penggunaan *big data* untuk partai politik dan para calon legislatif yang mampu menekan biaya kampanye konvensional. Karena dengan penggunaan *big data*, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk alat peraga kampanye contohnya. Hal tersebut sudah dilakukan oleh partai politik Golkar, calon legislatif Bambang Soesatyo, Hidayat Nur Wahid dan Ledia Hanifa. Namun hal yang penting untuk diketahui oleh khalayak adalah belum adanya penelitian yang membuktikan apakah dengan *big data*, kampanye digital mampu mendongkrak popularitas partai politik maupun calon legislatif yang menggunakannya.

Pada unsur grafik dapat dilihat di halaman utama dengan judul “Pengguna Internet di Indonesia Tahun 1998-2017 (juta orang)”. Grafik yang ada menjelaskan pada tahun 1998 yang menggunakan internet sebanyak 0,5 juta orang, tahun 1999 1 juta orang, tahun 2000 sebanyak 1,9 juta orang, tahun 2001 sebanyak 4,2 juta orang, tahun 2002 sebanyak 4,5 juta orang kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi 20 juta pengguna, tahun 2010 sebanyak 42 juta orang, tahun 2014 sebanyak 88,1 juta orang dan pada tahun 2017 sebanyak 143,2 juta orang pengguna internet.

Pada analisis framing yang telah dilakukan menunjukkan konsep framing sosiologis, dimana Surat Kabar Harian Kompas memberikan tulisan mengenai para calon legislator dan partai politik yang menggunakan big data sebagai strategi dalam menyusun kampanye pada pemilihan umum mendatang.

Media massa mempunyai fungsi yang menyediakan dan mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan atas permasalahan publik. Hal ini termasuk dengan kampanye dan kepentingan politik, image seseorang atau kandidat politik yang dapat diciptakan dan didistribusikan kepada khalayak melalui media massa. Dalam pembangunan image politik, adanya proses komunikasi kerap kali terjadi secara tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa (Hasyim dalam Ikasari, 2020: 76).

Frame berita yang disajikan pada 30 Januari 2019 yang berisi mengenai calon legislatif dan partai politik yang menggunakan big data sebagai salah satu cara dalam berkampanye. Merupakan cara Surat Kabar Kompas dalam mendistribusikan informasi kepada khalayak untuk melihat cara yang digunakan para calon legislatif yang akan kembali bertarung pada pemilihan umum juga partai politik. Kompas menjadi salah satu media yang memberikan edukasi kepada pembaca mengenai keadaan yang akan dilakukan oleh para calon legislatif dan partai-partai yang turut andil dalam berkampanye menggunakan big data pada pemilihan umum mendatang.

## 3.9 Analisis Berita 9

### 3.9.1 Struktur Sintaksis

*Headline* : Rekam Jejak Caleg (31 Januari 2019)

Dalam pemilihan judul *headline* seperti diatas, menyiratkan bahwa kita sebagai pemilih harus mengetahui bagaimana kinerja calon legislatif pada masa jabatan sebelumnya. *Lead* yang dituliskan menegaskan hal yang sama yaitu ‘KPU mengumumkan ada 49 caleg bekas narapidana perkara korupsi. Pengumuman ini menjadi masukan penting bagi calon pemilih saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019’. Unsur berikutnya mengenai latar informasi yang menjelaskan mengenai 40 orang calon legislatif tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari 12 partai politik dan 9 orang merupakan calon legislatif DPD dari tujuh provinsi. Empat partai politik yang tidak mempunyai calon legislatif bekas narapidana korupsi adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia.

Pengumuman yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk tanggung jawab kepada khalayak seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman,

“Yang terpenting, publik mengetahui informasi ini. Soal apakah mereka akhirnya memilih atau tidak memilih caleg-caleg ini, KPU tidak bisa memengaruhi mereka. Silahkan publik menentukan pilihannya sendiri”.

Langkah yang telah dilakukan oleh KPU mendapat sambutan baik dari Sekretaris Jendral Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria pada pernyataannya berikut ini,

“Golkar tidak mempermasalahkan keputusan KPU mengumumkan nama-nama caleg bermasalah. Sikap Golkar ini merupakan wujud komitmen partai untuk menegakkan pakta integritas yang sudah ditandatangani semua caleg dan pengurus partai”.

Ahmad Riza memberikan ungkapan yang tidak jauh berbeda dari Lodewijk, bahkan mendorong agar KPU melakukan penyisiran rekam jejak yang sama pada pejabat eksekutif, “Kami mendukung langkah KPU, tetapi tolong jangan hanya membuka nama-nama-caleg bermasalah, tetapi pejabat lainnya juga”. Kesan yang ingin diungkapkan oleh Ahmad Riza adalah hal yang dilakukan KPU harus adil bukan hanya calon legislatif saja yang dibuka ke publik tentang rekam jejak masa lalunya namun pejabat eksekutif juga seperti presiden, wakil presiden dan menteri.

Dalam penyusunan fakta selain kedua narasumber diatas, terdapat dua narasumber lain yang dipilih oleh Surat Kabar Harian Kompas yaitu Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati dan Mantan anggota KPU, Hadar Nafis Gumay. Pada paragraf penutup, mengutip pernyataan Hadar bahwa para pemilih akan mendapatkan manfaat dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU, mengenai data diri, calon legislatif dari partai apa dan lain sebagainya. Namun informasi dari KPU mengenai latar belakang calon legislator belum sepenuhnya optimal mengingat tidak semua calon legislatif mau membuka profil dirinya di situs KPU.

### **3.9.2 Struktur Skrip**

Unsur kelengkapan berita dalam 5W+1H dijelaskan bahwa unsur *What* membahas mengenai Mencermati Rekam Jejak Calon Legislatif. Terdapat 49 calon legislatif mantan narapidana perkara korupsi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia dan 12 Partai Politik diantaranya, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Indonesia, Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional yang masuk dalam unsur *Who*. Pengumuman mengenai calon legislatif mantan narapidana perkara korupsi oleh Ketua KPU dan para Komisioner KPU disampaikan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 masuk dalam unsur *When* dan bertempat di Media Center KPU sebagai unsur *Where*.

Pada unsur *Why*, dijelaskan oleh Ketua KPU Arief Budiman bahwa pengumuman yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab KPU untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu dan mengenai data yang disampaikan pihaknya telah mengecek validitas data di KPU daerah untuk memastikan nama yang diumumkan tidak ada kesalahan. Pada unsur berikutnya yaitu *How*, pengumuman KPU harus ditindaklanjuti oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dengan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terutama pada daerah pemilihan calon legislatif tersebut. Dengan sosialisasi yang dilakukan, calon pemilih akan mempunyai bekal informasi yang kuat mengenai calon wakil mereka yang diungkapkan oleh Mada Sukmajati sebagai pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Pernyataan Hadar Nafis Gumay sebagai mantan anggota KPU menjelaskan bahwa Undang-undang telah mengatur bekas napi untuk mengumumkan statusnya dan KPU dalam posisi ini hanya mempertegas saja.

### **3.9.3 Struktur Tematik**

Pada struktur tematik ini atau cara wartawan dalam menuliskan berita terdapat satu tema dengan keseluruhan teks terdapat 16 paragraf. Elemen detail terdapat pada detail kalimat yang digunakan oleh wartawan yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai partai yang tidak mempunyai rekam jejak buruk atau tidak pernah terlibat dengan perkara korupsi, partai tersebut berjumlah empat yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia. Penjelasan ini diberikan kepada khalayak untuk memberikan kesan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya partai dengan rekam jejak buruk namun ada partai yang masih mempunyai calon legislatif dengan rekam jejak yang baik.

Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks Surat Kabar Harian Kompas yaitu bentuk kalimat induktif dengan inti teks yang ada di awal paragraf. Pengumuman yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bukan tanpa dasar yang jelas karena sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 182 dan pasal 240 yang menyebutkan calon legislatif dengan status bekas terpidana untuk diumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. Pernyataan yang dituliskan tersebut ingin memberikan gambaran kepada khalayak bahwa Kompas memberikan informasi berdasarkan fakta.

### 3.9.4 Struktur Retoris

Pada struktur ini, pemilihan kata yang dipilih untuk menekankan fakta pada teks berita adalah kata ‘bekas’ pada kalimat caleg ‘bekas’ napi perkara korupsi kemudian kata penyisiran dari kalimat ‘penyisiran rekam jejak caleg’. Informasi yang ingin disampaikan kepada khalayak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh calon legislatif pada masa lalu dan kemudian mencalonkan kembali pada pemilu 2019 merupakan hak para pemilih agar menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Unsur berikutnya adalah foto yang terletak pada halaman utama, foto tersebut menjelaskan Ketua Pemilihan Umum Arief Budiman di damping oleh 5 komisioner KPU yang sedang mengumumkan nama-nama calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi.

Pada grafik yang ditampilkan, terdapat nama partai dan dari DPD yang dibawahnya dilanjutkan dengan nama-nama para calon legislatif. Partai Golkar sebanyak 8 orang, Partai Hanura sebanyak 5 orang, Partai Berkarya sebanyak 4 orang, PKPI sebanyak 2 orang, Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 9 orang, Partai Demokrat sebanyak 4 orang, Partai Garuda sebanyak 2 orang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan PDI Perjuangan masing-masing sebanyak 1 orang, Partai Gerindra sebanyak 6 orang, Partai Amanat Nasional sebanyak 4 orang, Partai Perindo sebanyak 2 orang. Kemudian pada halaman utama di sebelah kanan bawah terdapat keterangan dengan judul ‘Aturan Caleg Terkait Pencalonan Bekas Narapidana’ yang membahas 3 pasal yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 240 ayat 1 huruf g UU No. 7 Tahun 2017

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

2. Pasal 4 ayat 3 PKPU No. 31 Tahun 2018

Partai politik tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

3. Pasal 45 A ayat 1 dan 2 Huruf d PKPU No. 31 Tahun 2018

Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi wajib menyampaikan bukti pernyataan yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Pada nama-nama calon legislatif mantan narapidana korupsi yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, hal yang menarik adalah pembuatan tata letak grafik pada Partai PDI Perjuangan. Letak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada di paling bawah grafik dengan 1 nama calon legislatif mantan narapidana. Padahal lebih atasnya lagi ada Partai Bulan Bintang yang juga mempunyai 1 nama calon legislatif. Hal ini menurut peneliti bisa dijadikan sebagai penggiringan opini jika khalayak berpikir secara kritis bahwa Surat Kabar Harian Kompas mempunyai kecenderungan politik dengan pemerintah.

Analisis framing yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsep framing yang ada pada berita *headline* 31 Januari 2019 adalah konsep psikologis. Berita yang ingin disampaikan oleh Surat Kabar Harian Kompas kepada khalayak adalah para calon narapidana yang akan kembali mencalonkan dirinya pada kontestasi

politik pemilihan umum mendatang. Dan ingin meyakinkan para pemilih dengan informasi nama-nama calon legislatif yang pernah terjerat kasus korupsi sebelumnya.

Visual yang ditunjukkan pada halaman utama Surat Kabar Harian Kompas menunjukkan bahwa betapa nama-nama calon legislatif yang pernah terjerat kasus korupsi kemudian mencalonkan kembali harus diketahui oleh pembaca. Visual framing dapat menyampaikan pesan yang tidak dapat dilakukan dalam verbal framing. Dalam konteks visual framing, kehadiran sebuah visual membantu dalam mentafsirkan peristiwa dalam suatu berita (Messaris dan Abraham dalam Dunan, 2014: 27). Dampak dari visual yang dilakukan adalah bagi seseorang kandidat baik dari televisi ataupun foto yang ada pada surat kabar lebih meyakinkan pemilih dibandingkan kata-kata ataupun tulisan (Domke dalam Dunan, 2014: 28).

Hal yang telah dilakukan oleh Surat Kabar Harian Kompas dalam hal ini adalah dengan memberikan visual yang ada pada halaman utama lebih menarik perhatian pembaca dan akan memahami informasi yang diberikan. Nama-nama calon legislatif yang ditunjukkan diharapkan menjadi pertimbangan bagi para calon pemilih pada kontestasi politik pemilihan umum yang akan diselenggarakan bulan April tahun 2019.

### **3.10 Analisis *Gatekeeping* Surat Kabar Harian Kompas**

#### **3.10.1 Level Individual**

Berita merupakan laporan paling cepat yang berkaitan dengan fakta atau berupa ide baru yang benar, menarik atau merupakan suatu hal penting untuk sebagian

khalayak. Melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online. Sebuah berita bukan hanya merujuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan tradisional, namun terdapat pula pada media dalam artian luas dan modern (Sumadiria, 2005: 65). Kaitannya dengan proses *gatekeeping* yang terjadi pada Surat Kabar Harian Kompas yaitu dimulai dari pengumpulan berita apa saja yang berhasil diliput oleh para *gatekeeper* yang kemudian di tentukan atau di seleksi kembali mana berita yang layak menjadi sebuah *headline* pada hari itu dengan diadakannya rapat bersama dan hasilnya harus di setujui oleh semua anggota yang hadir. Pada level individual, Shoemaker menjelaskan ada beberapa unsur yang dapat dianalisis. Seperti latar belakang individu dapat dilihat dari pendidikan dan tipe pekerjaan yang dimiliki apakah seorang *gatekeeper* yang mencari berita dan menuliskan kembali berita atau seorang editor yang memproses berita yang mampu membuat seseorang memberikan dampak atau pengaruh dalam sebuah pemberitaan di media dan jika seseorang atau individu mempunyai jabatan yang dinilai penting di perusahaan media tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan ada intervensi dalam kemunculan suatu berita.

Berita muncul dari jutaan peristiwa di dunia, namun suatu peristiwa yang terjadi tidak menentukan atau bahkan tidak berpotensi menjadi berita karena adanya batasan yang disediakan dan dihitung apakah hal tersebut masuk dalam sebuah berita atau bukan. Peristiwa yang menjadi sebuah berita harus dinilai terlebih dahulu apakah memenuhi kriteria dalam nilai berita (Eriyanto, 2002: 202). Wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Wakil Redaktur Pelaksana Surat Kabar Harian Kompas, Marcelus Hernowo memberikan pernyataan bahwa

*gatekeeper* selalu diberikan kriteria dan pedoman sesuai dengan visi dan misi yang sesuai dengan perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan tidak menyalahi aturan. Seperti kutipan pernyataan sebagai berikut :

“Kalo kriteria pasti ada berita layak Kompas yang pertama harus sesuai dengan undang-undang pers selain itu berita Kompas harus mencerahkan publik dan kami memberikan (buku pedoman) tapi hanya untuk kalangan internal saja, kami memang punya tapi buku pedomannya tidak bisa untuk orang umum”.

Pernyataan yang disampaikan Marcellus menunjukkan bahwa berita-berita yang muncul di semua Surat Kabar Harian Kompas merupakan berita yang sudah sesuai dengan undang-undang pers dan tidak akan dimunculkan jika melanggar aturan tersebut. Pedoman yang diberikan kepada para *gatekeeper* juga dinilai penting karena sebagai acuan berita yang layak untuk dikonsumsi khalayak. Namun buku pedoman tersebut tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Pada latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kualitas narasi yang dibentuk, namun Kompas tidak memberikan batasan bahwa yang bekerja di perusahaan mutlak dengan pendidikan jurnalistik. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Tidak semua wartawan kami mempunyai latar belakang pendidikan jurnalistik, kami semua dari kalangan yang berbeda-beda ada yang dari politik, hukum, ekonomi, pemerintahan, elektro, hubungan internasional, sastra perancis ya pokoknya kita dari macam-macam kita saling melengkapi kita belajar bersama disini karena sebelum menjadi wartawan kita ada karantina terlebih dahulu baru nanti setelah karantina benar-benar bisa terjun dalam dunia jurnalistik”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa *gatekeeper* yang dimiliki perusahaan Kompas tidak mengharuskan berlatar belakang pendidikan jurnalistik untuk menjadi bagian dari perusahaan. Masa karantina yang dilakukan merupakan

tahapan belajar dari masing-masing individu untuk memperdalam ilmu jurnalistik dan kemudian dapat menuliskan berita. Berita yang dimiliki oleh *gatekeeper* melalui proses yang sedikit rumit karena berita apa saja yang diperoleh dikumpulkan kemudian masuk bagian editor dan kemudian dirapatkan terlebih dahulu sebelum menjadi *headline*. Selain itu *gatekeeper* harus memenuhi tuntutan dengan memberikan informasi yang objektif, kreatif dan peka terhadap situasi yang terjadi seperti tema politik yang diangkat oleh Surat Kabar Harian Kompas mempunyai porsi lebih banyak daripada tema yang lainnya. Para *gatekeeper* harus memiliki posisi yang jelas dalam penulisan berita dan para *gatekeeper* tidak bisa menentukan berita yang telah di dapatkan untuk menjadi *headline* pada hari itu. Seperti yang diungkapkan oleh wakil redaktur pelaksana :

“Kalau untuk wartawan tidak bisa ya, karena wartawan mencari berita terus nanti ke editor di rapatkan sama kita dan nanti hasil akhirnya akan dibuat sebagai *headline*, halaman kedua nanti apa saja yang akan dimunculkan dan seterusnya. Semua berita yang ada itu harus melalui persetujuan. Dan panduan dari kompas adalah pemilu harus sukses, ini pemilu yg ke 5. Sukses itu bahwa rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Informasi yang diberikan juga harus kritis dan informasi yang diberikan harus jujur”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa berita yang dikonsumsi oleh khalayak merupakan berita yang telah sesuai dengan undang-undang pers dan bersifat mencerahkan publik. *Gatekeeper* yang tergabung dalam Surat Kabar Harian Kompas pun mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam tidak mengharuskan berlatar belakang jurnalistik. Dalam penentuan kebijakan *headline* yang akan dimunculkan, *gatekeeper* tidak mempunyai peran yang kuat karena semua berita yang ada harus diseleksi terlebih dahulu dan melalui

persetujuan dalam rapat yang dilakukan. Berkaitan dengan tema politik yang mempunyai jumlah lebih banyak pada Januari 2019, informasi yang ingin diberikan kepada khalayak adalah pemilihan umum ini harus terlaksana dengan baik melalui pemberitaan yang jelas, kritis dan jujur.

Dalam sebuah perusahaan media massa tentu saja mempunyai ideologi. Ideologi objektivitas merujuk pada pengumpulan berita dan laporan yang mengedepankan para saksi mata terkait peristiwa tertentu serta pengecekan fakta dari banyak sumber dan adanya keberimbangan titik pandang. Prinsip objektivitas yang dijalankan oleh seorang wartawan dapat diartikan sebagai usahanya untuk menghindari subjektivitas pribadinya (Nasution dalam Abkoriyah, 2017: 45). Untuk menentukan sebuah objektivitas dalam berita, menurut Everette E. Dennis ada tiga aspek nilai objektivitas yaitu memisahkan fakta dengan opini, memilah deskripsi yang sifatnya emosional dari berita dan mengupayakan keadilan dan keseimbangan (dalam Abkoriyah, 2017: 45).

Surat Kabar Harian Kompas dalam menyajikan berita sesuai dengan hasil wawancara dengan Wakil Redaktur Pelaksana, bahwa sudah memenuhi ideologi seperti yang dimaksudkan oleh Nasution bahwa mengedepankan saksi atau narasumber yang beragam dan isi berita yang tidak melanggar undang-undang pers yang ada. Namun mengenai tiga aspek objektivitas yang disampaikan oleh Everette pada salah satu aspeknya, Kompas belum sepenuhnya memisahkan fakta dan opini yang masuk oleh *gatekeeper* dalam penulisan beritanya. Sehingga masih ada berita yang bersifat subjektif.

### 3.10.2 Level Rutinitas Media

Rutinitas media dapat diartikan sebagai kegiatan media dalam mengemas suatu berita. Bagaimana nilai berita tersebut bagi khalayak. Hal ini diterapkan juga pada Surat Kabar Harian Kompas. Sumber berita yang diperoleh oleh *gatekeeper* kemudian diolah dan dikemas semenarik mungkin dan berita tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga informasi yang diberikan kepada khalayak merupakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola seperti itu dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan pada sistem kerja. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini :

“Dalam sebuah berita kita mencari isu penting apa yang sekarang sedang hangat, apa yang penting juga bagi masyarakat yang perlu digaris bawahi adalah kita bukan media yang membahas berita hanya sekedar berita yang sedang heboh di masyarakat karena sudah ada media yang pasti akan membahasnya, kita mempunyai standar apakah berita tersebut sudah sesuai dengan visi misi perusahaan dan bagaimana berita yang akan diberikan kepada masyarakat bukan sekedar mencari atensi untuk dibaca tapi kita memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui Surat Kabar Harian Kompas dalam menentukan berita atau memilih *headline* mempunyai batasan-batasan atau standar yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bekerja di dalamnya. *Gatekeeper* mempunyai peran penting dalam mencari berita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh khalayak, bukan sekedar apa yang sedang hangat diperbincangkan namun tidak terlepas juga dari visi-misi perusahaan yang sudah menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Berita layak yang menjadi *headline* tidak terlepas dari proses seleksi, selain itu *gatekeeper* dalam menuliskan sebuah berita tidak diperbolehkan mengandung unsur keberpihakan pada isinya. Unsur-unsur lain yang

ada pada *headline* semua sudah sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut ini :

“Dilakukan di rapat redaksi ya kita saling debat atau diskusi aja sampai nanti kita sepakat ada satu berita yang akan naik menjadi *headline*, sebelum menjadi wartawan kita kan sudah saling belajar bersama kita berproses bersama..kalau ada tulisan-tulisan yang sumbang ya kita saling mengingatkan saling kontrol, tidak boleh juga nrima amplop dan selalu menjaga jarak professional dan dalam penulisan *headline* biasanya mempunyai ukuran 14 dalam font GR 4, semua ada di buku panduan. Karena tiap hari minggu nanti kita juga ada pake font apa seperti itu”.

Untuk mendapatkan berita mana yang akan menjadi *headline* utama pada hari tersebut, rapat redaksi dilakukan dan membuat sebuah keputusan yang telah disepakati bersama dan *gatekeeper* yang bertugas menuliskan kembali berita, jika diketahui dalam tulisannya tersebut lebih condong memihak pada salah satu tokoh atau dinilai tidak netral maka teguran akan disampaikan langsung. Dalam menjaga netralitas, perusahaan mempunyai komitmen bahwa *gatekeeper* yang bertugas di lapangan tidak diperbolehkan menerima ‘amplop’ dari narasumber, profesionalisme dalam bekerja harus dijaga.

Proses *gatekeeping* pada level rutinitas media, menurut Mcquail melibatkan berbagai macam tindakan pemilihan yang mempunyai urutan berdasarkan periode produksi berita dan seringkali melibatkan kelompok pembuat keputusan. Rujukan pada proses *gatekeeping* tidak hanya dibuat terhadap aspek konten, namun dilihat pada jenis khalayak yang diharapkan (dalam Ayuni, 2019: 9). Dalam hal ini Wakil Redatur Pelaksana Kompas menyatakan bahwa pada proses pembuatan berita hal-hal yang diperhatikan adalah bahwa Kompas memberikan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan oleh Mcquail pada proses

*gatekeeping* Surat Kabar Harian Kompas juga melibatkan kelompok pembuat keputusan untuk menentukan *Headline* yang akan diangkat pada hari yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan tersebut nantinya akan disetujui oleh semua pihak.

### **3.10.3 Level Organisasi**

Proses *gatekeeping* pada level organisasi berkaitan dengan pertimbangan yang dilakukan terkait dengan bagaimana strategi pengambilan keputusan oleh kelompok. Mempertanyakan peran yang dilakukan, aturan yang diterapkan dari pekerja tingkat atas sampai dengan tingkat bawah dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. Hal tersebut juga terjadi pada Surat Kabar Harian Kompas, bahwa apapun situasi dan kondisi yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimana setiap individu yang berperan dalam proses pembuatan berita sampai nanti diputuskan mana berita yang terpilih menjadi *headline*, semua terlibat sesuai dengan porsinya masing-masing. Hal tersebut dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut :

“Kita melakukan rapat (dipandu pemimpin redaksi) nah dalam rapat tersebut kita saling berdiskusi mana berita yang akan naik menjadi *headline* kalau nanti semua anggota setuju ya kita putuskan itu”.

Rapat yang diadakan untuk menentukan berita mana yang naik menjadi *headline* selain diputuskan oleh pemimpin redaksi, juga harus disetujui oleh semua orang yang hadir dalam rapat tersebut sehingga keputusan berdasarkan hasil musyawarah bersama dapat diterima oleh semua anggota. Dalam melakukan rapat tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi selisih paham oleh masing-masing anggota, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik seperti kutipan

pernyataan berikut, “Kita selesaikan dengan kekeluargaan tidak mungkin kita saling ngotot gitu ya”. Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa pada Surat Kabar Harian Kompas, masalah yang muncul diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga semua pihak dapat menerima keputusan akhir.

Sikap kekeluargaan yang sudah sejak lama dibangun dalam perusahaan, apakah mempunyai korelasi terkait dengan pemilik media dengan isi berita yang dikonsumsi oleh khalayak. Hal tersebut dinyatakan oleh Marcellus Hernowo,

“Kami bekerja sama sudah lama ya memang pemred punya hak veto, harus ada alasan logis dalam suatu hal. Jadi apapun itu harus bisa dijelaskan alasannya sehingga kami semua dapat memahami dan ketika belum jadi keputusan ya bisa didiskusikan tapi kalau sudah diputuskan ya harus dilaksanakan”.

Pada pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemimpin redaksi mempunyai hak veto, artinya pemimpin redaksi mempunyai hak untuk mencegah, menyatakan, menolak atau membatalkan keputusan yang ada. Namun hak tersebut tidak digunakan dengan arogan, hak tersebut digunakan harus dengan pertanggung jawaban yang jelas. Alasan yang melatarbelakangi keputusan yang di ambil harus logis bukan semata-mata karena emosional. Selama belum menjadi keputusan akhir, diskusi akan dilakukan dan jika keputusan telah diambil maka semua anggota harus melaksanakan.

Meskipun pemimpin redaksi mempunyai hak veto dalam pengambilan keputusan, posisi Surat Kabar Harian Kompas terkait pemberitaan politik dalam merepresentasikan kepada khalayak sudah ditentukan seperti kutipan wawancara berikut,

“Terkait pemberitaan politik itu posisi kami adalah pemilu harus berhasil, harus sukses, aman, tertib memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Jika sudah selesai pemilu itu ya kita harus patuhi karena demokrasi adalah aturan main”.

Dari pernyataan diatas, posisi Surat Kabar Harian Kompas terkait pemberitaan dengan tema politik, yang ingin disampaikan adalah informasi untuk khalayak merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh Kompas. Memberikan informasi mengenai pemilu mendatang secara gamblang sehingga nanti ketika hasil pemilu sudah ditentukan maka seluruh lapisan masyarakat harus bisa menerima dan mentaati karena pemilu merupakan bagian dari demokrasi.

Pada level organisasi, dijelaskan diatas bahwa Pemimpin redaksi dalam hal ini juga bagian dari *gatekeeper* mempunyai hak veto. Sehingga berita yang akan ditampilkan sudah melalui tahapan rekonstruksi dan informasi yang akan diberikan sudah tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Hal ini tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk (Nugroho, 2013: 291). Independen dalam hal ini bahwa seharusnya Surat Kabar Harian Kompas memberikan informasi atau fakta yang sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pemilik atau pemegang jabatan tertinggi perusahaan.

#### **3.10.4 Level Ekstramedia**

Pada level ekstramedia terdapat institusi di luar media yang memengaruhi proses *gatekeeping*, yaitu lingkungan pasar dan bisnis. Pasar dari produk media meliputi dua kelompok yaitu masyarakat konsumen media dan pemasang iklan. Konsumen

mempunyai peran sebagai rating sedangkan pengiklan mempunyai peran sebagai pendukung pendapatan media dan keberlangsungan media tersebut. Tidak terkecuali dengan Surat Kabar Harian Kompas. Selain konsumen, pengiklan merupakan penyalur dana terbesar seperti kutipan wawancara berikut :

“Untuk sampai saat masih ada pihak-pihak yang masih mau beriklan di Kompas karena percaya dengan Kompas dengan kualitas berita-berita kami dan pengiklan paling besar dari perusahaan swasta”.

Perusahaan swasta merupakan pengiklan dengan porsi yang besar dan dengan alasan kepercayaan akan hasil pemberitaan yang dihasilkan oleh Surat Kabar Harian Kompas, maka iklan-iklan yang ingin disampaikan kepada khalayak sepenuhnya diberikan kepada media cetak Kompas. Para pengiklan akan memasarkan produknya pada segmen tertentu yang sesuai dengan target pasar dengan cara membeli *space* di media yang diinginkan. Bahkan tidak segan mencetak 1 halaman penuh untuk iklan saja agar menarik perhatian pembaca. Para pengiklan bisa memengaruhi apa yang masuk, apa yang dipilih dan bagaimana pesan-pesan tersebut ditampilkan di media.

Selain iklan yang menjadi sumber dana besar bagi Surat Kabar Harian Kompas yang masuk pada bagian bisnis, dalam membentuk pasar beberapa *event* diadakan untuk menyebarkan dan memperkenalkan Kompas kepada masyarakat luas. Seperti kutipan wawancara berikut :

“Kami ada beberapa *event* untuk mendukung brand kami di masyarakat dan meluaskan pengaruh dari berita Kompas. Borobudur *Marathon*, Tambora *challenge* misalnya event seperti itu dilakukan untuk menularkan gagasan atau ide-ide miniaturnya Indonesia. Ekspedisi Kopi untuk mengenalkan kopi-kopi Nusantara, selain menjadi sumber pemasukan kami juga mengenalkan *brand* Kompas dan mengenalkan Indonesia lewat *event-event* itu”.

Pernyataan diatas memberikan penegasan bahwa *event* yang telah dilakukan seperti Borobudur Marathon yang sudah dirintis sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 sukses terlaksana dengan kapasitas 10.000 peserta setiap tahunnya, Tambora *Challenge* yaitu lomba ultra *marathon* dengan rute terpanjang dan ter-ekstrem di Indonesia dan mempunyai batas waktu lomba selama 60 dan 64 jam yang dilakukan di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain itu disiapkan total hadiah puluhan juta bagi para peserta. *Event* lain yang dilakukan yaitu Jelajah Kopi Nusantara (Ekspedisi Kopi), yaitu perjalanan wartawan Kompas dalam mengungkapkan kisah dan geliat kopi Nusantara dari keanekaragaman dan keistimewaan kopi, sejarah, industri, tren anak muda dalam mengkonsumsi kopi, kreativitas, inovasi hingga kisah gerakan sosial yang tumbuh didalamnya. *Event-event* seperti ini digunakan untuk memperkenalkan bagian dari Indonesia namun tetap mengacu pada perluasan pengaruh media cetak Kompas kepada khalayak

#### **1.10.5 Level Sistem Sosial**

Sistem sosial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sistem sosial, struktur sosial, ideologi, dan budaya. Pemikiran tentang ideologi, sesuai dengan pandangan paradigma kritis yang mendominasi cara berpikir pekerja media. Ideologi merupakan kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Yang berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Shoemaker dan Reese berpendapat jika isi media dapat dipengaruhi oleh faktor ideologi pada masing-masing media. Sedangkan ideologi merupakan pembatas dalam kehidupan masyarakat dan membuat keberadaan ideologi sebagai

mekanisme simbolik. Dalam tahapan ideologi ini menjadikan institusi tersebut sebagai tempat dalam mencapai tujuan yang mempunyai maksud terselubung yang berdasarkan suatu kepentingan (Shoemaker dan Reese, 1996: 223).

Ideologi dalam level sistem sosial ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap isi atau program yang disampaikan kepada masyarakat. Ideologi yang dianut oleh Surat Kabar Harian Kompas yang dinyatakan dalam kutipan wawancara bahwa :

“Kompas adalah hati nurani rakyat kami harus mencerahkan masyarakat dengan informasi-informasi yang diberikan. Ya kita sortir semua, ada banyak berita yang memang tidak sejalan dengan Kompas ya kita tidak akan angkat itu. Kita harus tegas berita Kompas diusahakan berkualitas”.

Dengan ideologi tersebut, Kompas mencoba memberikan informasi dengan mengedepankan mutu bukan berita sensasional demi mendapatkan perhatian masyarakat. Peran gatekeeper inilah yang memberikan hasil akhir kualitas berita yang disampaikan kepada khalayak. Semua informasi yang masuk dipilih dan merupakan wewenang gatekeeper menentukan mana berita yang penting dan dimuat dalam media.

Media merupakan salah satu institusi yang mempunyai ideologi dan sebagai penyuplai beberapa unsur di dalamnya seperti nilai, kekuatan dan kepentingan. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa media saat ini merupakan alat dalam menyebarluaskan rangkaian informasi dengan suatu kepentingan yang mendominasi. Dengan hal tersebut, media bisa dikatakan sebagai ruang yang tidak netral karena kepentingan, pemaknaan dari berbagai kelompok akan dinilai sama

(Sudibyo, 2001: 55). Kepentingan yang ada dalam Surat Kabar Harian Kompas jika dilihat dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak terlalu tampak melalui berita yang ditampilkan, salah satunya dari *headline* berita politik.

*Headline* dengan tema politik pada bulan Januari 2019 merupakan jumlah terbanyak pada Surat Kabar Harian Kompas. Pada setiap pemberitaan, *gatekeeper* yang mempunyai peranan paling penting adalah editor. Selain pemeriksaan isi berita, perbaikan tata bahasa juga dilakukan dan bagaimana nilai berita tersebut bagi khalayak. Terkait hal tersebut, pandangan Surat Kabar Harian Kompas mengenai berita politik dan afiliasi politik dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut :

“Kompas harus mendudukan persoalan wartawan ketika menulis berita ya harus berintegritas, terkait afiliasi politik, jadi gini ya kompas itu ya tidak ikut kanan atau ikut kiri ya kompas di tengah-tengah. Mencerahkan masyarakat, dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat”.

Pada pernyataan diatas dapat diketahui bahwa berita politik yang diterbitkan oleh Surat Kabar Harian Kompas harus mendudukan persoalan, artinya bahwa Kompas harus mampu menyelesaikan (permasalahan) dalam setiap berita yang diterbitkan. Dengan posisi *gatekeeper* menuliskan kembali berita harus jujur dan memberikan kutipan pernyataan dari narasumber yang sesuai dengan tema yang diangkat. Dalam hubungan politik, ditegaskan bahwa Surat Kabar Harian Kompas tidak menjalin hubungan dengan partai politik manapun. Posisi yang dipilih adalah mencerahkan khalayak. Memberikan informasi yang diperlukan oleh khalayak.

Namun Informasi yang telah disampaikan kepada khalayak oleh media belum tentu sepenuhnya merupakan informasi yang bebas dari manipulasi. Menurut Henderson teknik manipulasi sangat dekat dengan proses akhir dari pembuatan konten media. Yang sebelum sampai pada tahap manipulasi, banyak hal lain yang harus dilakukan hingga tercipta sebuah manipulasi sampai akhirnya konten berita tersebut terbentuk (dalam Ayuni, 2019: 16).